LAPORAN HASIL PENELITIAN

IMPLEMENTASI SAK ETAP PADA BPR DI KALIMANTAN SELATAN

TIM PENGUSUL

KETUA :
Drs. Ec. Syaiful Hifni, M.Si, Ak / NIDN.0004096309

ANGGOTA :
Drs. Ec. Akhmad Sayudi, M.Si, Ak. / NIDN. 0025036205
Dra. Rusma Nailiah, M.Si, Ak. / NIDN.0020076601
Rano Wijaya, SE, M.Si, M.Fin / NIDN.0004057505
Saprudin, SE, M.Si, Ak. / NIDN.0005127108
M. Nordiansyah, SE, M.Ak, Ak. /NIDN.0025118101

Sumber dana :
BOPTN - FE UNLAM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS EKONOMI
BANJARMASIN

2013

LAPORAN HASIL PENELITIAN

IMPLEMENTASI SAK ETAP PADA BPR DI KALIMANTAN SELATAN

TIM PENGUSUL

KETUA :
Drs. Ec. Syaiful Hifni, M.Si, Ak / NIDN.0004096309

ANGGOTA :
Drs. Ec. Akhmad Sayudi, M.Si, Ak. / NIDN. 0025036205
Dra. Rusma Nailiah, M.Si, Ak. / NIDN.0020076601
Rano Wijaya, SE, M.Si, M.Fin / NIDN.0004057505
Saprudin, SE, M.Si, Ak. / NIDN.0005127108
M. Nordiansyah, SE, M.Ak, Ak. /NIDN.0025118101

Sumber dana :
BOPTN - FE UNLAM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS EKONOMI
BANJARMASIN

2013

REKAPITULASI HASIL PENELITIAN

1.	Judul Penelitian	:	Implementasi SAK ETAP Pada BPR di Kalimantan Selatan
2.	Organisasi		Fakultas Ekonomi UNLAM
3.	Ketua Tim		
	Nama	:	Drs. Ec. Syaiful Hifni, M.Si, Ak.
	NIDN	:	0004096309
	Jabatan/Pangkat/Golongan	:	Lektor Kepala/Pembina Tk.I/IVa
	Unit Kerja	:	Fakultas Ekonomi UNLAM
4.	Anggota	:	1. Drs. Ec. Akhmad Sayudi, M.Si, Ak. 2. Dra. Rusma Nailiah, M.Si, Ak. 3. Rano Wijaya, SE, M.Si, Ak. 4. Saprudin, SE, M.Si, Ak. 5. M. Nordiansyah, SE, M.Ak, Ak.
5.	Jangka Waktu	:	4 (empat) bulan
6.	Sumber Dana	:	BOPTN FE UNLAM
7.	Dana Penelitian	:	Rp. 8.000.000,-
8.	Lokasi	:	Kalimantan Selatan

Banjarmasin, Nopember 2013
Ketua Tim Peneliti,

Drs. Ec. Syaiful Hifni, M.Si, Ak.
NIP. 19630904 199003 1 003

Ketua Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi Unlam

Dra. Rasidah, M.Si, Ak.
NIP. 19660119 199203 2 001

Mengetahui/Menyetujui,
Dekan Fakultas Ekonomi Unlam

Drs. Zakhyadi Ariffin, M.Si
NIP. 19600208198703 1 001

Mengetahui,
Ketua Lembaga Penelitian Unlam

Dr. Ahmad Alim Bachri, SE, M.Si
NIP 196712311995 121002

DAFTAR ISI

			Halaman
Rekapitulasi Hasil Penelitian			i
DAFTAR ISI			ii
DAFTAR TABEL			iv
DAFTAR GAMBAR			v
BAB	**1**	**PENDAHULUAN**	1
	1.1.	Latar Belakang	1
	1.2.	Rumusan Masalah	7
	1.3.	Tujuan Penelitian	7
	1.4.	Manfaat Penelitian	8
BAB	**2**	**LANDASAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL**	9
	2.1.	Landasan Teoritis	9
	2.1.1.	Lingkungan Akuntansi Keuangan	9
	2.1.2.	Aspek PEST Akuntansi	11
	2.1.3.	*Uniform versus Flexible Disclosures*	15
	2.1.4.	*Mandatory versus Voluntary Disclosures*	16
	2.1.5	Manfaat Pelaporan Keuangan	19
	2.2.	Kerangka Konseptual	28
	2.2.1.	Perspektif Kerangka Konseptual SAK ETAP	29
	2.2.1.1.	Konsep, Tujuan, Fungís dan Peran Akuntansi dengan Stándar ETAP	29
	2.2.1.2.	Konsep Fundamental Standar ETAP	29
	2.2.1.3.	Konsep Operasional Stándar ETAP	30
	2.2.1.4.	Acuan Pada Pendekatan *Historical Cost*	30
	2.2.2.	Konsep Penyajian/Pelaporan Stándar ETAP	31
	2.2.3.	Acuan SAK Akuntansi (PA BPR)	32
BAB	**3**	**METODE PENELITIAN**	36
	3.1.	Desain Penelitian	36
	3.2.	Metode Penelitian	36
	3.2.1.	Jenis dan Sumber Data	36
	3.2.2.	Teknik Pengambilan Data	36
	3.2.3.	Populasi	36
	3.2.4.	Aspek-aspek Penelitian	37
	3.2.5.	Teknik Analisis	37
BAB	**4**	**ANALISIS DAN PEMBAHASAN**	38
	4.1.	Deskripsi Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	38
	4.1.1.	Tinjauan Entitas Bank Perkreditan Rakyat	38
	4.1.2.	Organisasi Bank Perkreditan Rakyat	38
	4.2.	Deskripsi BPR di Kalilmantan Selatan	39
	4.2.1.	BPR – Perusahaan Daerah	40

4.2.1.1. Ketentuan Modal Disetor BPR Perusahaan Daerah 41
4.3. Aspek Pengembangan Akuntansi 43
4.3.1. Aspek Politik (Regulasi) 44
4.3.2. Aspek Sosial 46
4.3.3. Aspek Ekonomi 48
4.3.4. Aspek Teknologi 59

BAB 5 PENUTUP 71
5.1. Simpulan 71
5.2. Saran-saran 71

DAFTAR PUSTAKA 73

DAFTAR TABEL

No	Nama Tabel	Halaman
Tabel 3.1.	Aspek-aspek Terkait Implementasi SAK ETAP pada Entitas BPR	37

DAFTAR GAMBAR

No	Nama Gambar	Halaman
Gambar 2.1.	*Exhibit-The Financial Accounting Environmen*.....	9
Gambar 2.2.	*A Conceptual Framework for Financial Reporting*	23
Gambar 2.3.	Model Kerangka Konseptual FASB	24
Gambar 2.4.	*Basic Concept Underlying Historical Costing*	31
Gambar 2.5.	Kerangka Konseptual	35

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Proses konvergensi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan *International Accounting Standard* (IAS) dan *International Financial Reporting Standard* (IFRS) adalah untuk menetapkan acuan praktek akuntansi dengan suatu SAK Umum di Indonesia (SAK yang berbasis IFRS) yang diterapkan 1 Januari 2012. Penerapan standar umum (SAK berbasis IFRS) ini diberlakukan untuk entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dan yang memiliki konsentrasi pada lingkup transaksi luar negeri. Sementara untuk SAK ETAP yang diadopsi dari *IFRS for SMEs,* adalah bagian dari program konvergensi IFRS, dengan penekanan penerapannya pada entitas yang memiliki akuntabilitas yang tidak terlalu signifikan, seperti tidak memiliki transaksi luar negeri/tidak terkait pelaporan satuan moneter non rupiah dalam mekanisme pembayaran. Perubahan standar akan menimbulkan hal yang *debatable* untuk suatu pemenuhan peran akuntansi, jika hal ini disertai dengan adanya suatu bagian perubahan dalam elemen kerangka konseptual akuntansi. Sebagai penjelasan, dalam IFRS operasionalisasi akuntansi menggunakan *Fair Value* dan *Professional Judgment,* sedangkan dalam SAK ETAP sebagian besar tetap menggunakan konsep *Historical Cost.*

Bagi entitas yang dikatagorikan memenuhi definisi sebagai *SMEs* yang dengan berbagai kriterianya sesuai regulasi Kementerian Keuangan, BPS, dan pihak otoritas lainnya, dengan pemberlakuan Standar ETAP sebagai standar

"kecil" dari kerangka konseptual SAK umum ini, selanjutnya memerlukan pencermatan dalam penerimaan serta untuk penerapan Standar ke dalam praktek akuntansi organisasi. Bagi organisasi pelaksana akuntansi keuangan sesuai perkembangan lingkungan, memerlukan upaya untuk penerapan standar dan kebijakan akuntansi yang memenuhi asas *positive* dan *normative accounting*, yaitu bagaimana akuntansi diterapkan dan memenuhi kesesuaian dengan norma acuannya.

Sudut pandang standar akuntansi melalui kerangka konseptual yang *normative accounting*, dalam SAK ETAP dapat didekati dengan konsep entitas yang menjelaskan siapa yang memiliki mandatori untuk pelaksanaan standar. Aspek-aspek yang dijelaskan meliputi, (1) konsep tujuan yang mendasari fungsi dan peran akuntansi dengan standar yang diberlakukan, (2) konsep fundamental, terkait syarat mutu informasi dan identifikasi elemen/unsur/akun laporan keuangan, (3) Konsep operasional, terkait pengakuan dan pengukuran dan penilaian (didasarkan asumsi, prinsip, dan konstrain dalam normative perlakuan praktek akuntansi), (4) Konsep penyajian/pelaporan. Pemahaman terhadap 4 (empat) pilar tersebut, dapat memberikan makna kejelasan peran akuntansi dengan standar, serta kebijakan akuntansi yang diberlakukan. Berdasarkan SAK ETAP, akan memberikan arah bagi *accountor* dalam memenuhi aktfitas inti pekerjaan akuntansi. Bahkan dengan tantangan perubahan standar, saat standar sedang diimplementasikan, kesemuanya seharusnya tidak menjadi masalah dalam merealisir peran akuntasi dengan penerapan standar tertentu yang dijadikan acuan (SAK ETAP).

Penerapan acuan Standar Akuntansi pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang dapat menerapkan SAK ETAP (per 1 Januari 2010), adalah karena entitas ini didefinisikan tidak mempunyai akuntabilitas yang signifikan, terkait sifat transaksi keuangan perbankan yang dilakukan. Meskipun demikian, dalam penerapannya hal ini menjadi tidak sederhana, karena deskripsi standar yang sangat interpretatif. Sesuai kaidah praktek aturan akuntansi, maka diperlukan kebijakan akuntansi BPR yang menjadi operasionalisasi atau pedoman pelaksanaan standar akuntansi. Pedoman Akuntansi (PA) BPR yang ditetapkan Bank Indonesia memerlukan petunjuk teknis dari otoritas BI.

Kajian kasus terapan standar ini pada BPR di Kalimantan Selatan sebagai entitas yang menerapkan Standar ETAP yang ditetapkan adalah sesuai aspek pertimbangan dan rekomendasi regulator perbankan Bank Indonesia. BPR diizinkan oleh BI untuk menggunakan SAK ETAP (SE Ekstern, Nomor 11/37/DKBU/2009, Tentang Penetapan SAK bagi BPR, yang belaku sejak 1 Juli 2010). Penetapan dan pemberlakuan SAK ETAP bagi BPR didukung Pedoman Akuntansi (PA) BPR. Dalam hal ini Bank Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyepakati PA BPR sebagai Pedoman Akuntansi bagi BPR untuk penyajian laporan keuangan sesuai SAK ETAP sejak tahun 2010.

Mengacu pada masukan dan *lesson learned* dari seminar ETAP (FE Unlam, 2012), mendeskripsikan bahwa pelaksanaan akuntansi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) harus memenuhi penerapan sistem dengan 2 (dua) kerangka acuan, sehingga menghasilkan output laporan keuangan yang berbeda. Dalam praktek bagian akuntansi BPR mengelola transaksi secara rutin dengan acuan SAK

ETAP, namun pada akhir bulan harus membuat laporan keuangan dengan acuan PA BPR yang diterbitkan Bank Indonesia (BI). Sesuai konvensi dalam organisasi BPR, meskipun SAK ETAP memberikan atau menjadi dasar pilihan acuan perlakuan akuntansi, namun BPR tetap harus mengikuti pilihan praktek sesuai ketentuan BI mengacu PA BPR dengan dukungan petunjuk teknis pelaksanaan.

Sesuai realitas penerapan akuntansi dan pelaporan keuangan BPR diketahui adanya bentuk dan isi serta dampak dari perbedaan isi laporan keuangan yang disusun sesuai SAK ETAP dengan isi laporan ketika harus dilaporkan ke dalam format yang mengacu pada PA BPR BI. Terhadap kondisi ini, karena adanya acuan aturan akuntansi dari perlakuan akuntansi sesuai acuan SAK ETAP dan perlakuan akuntansi sesuai acuan PA BPR, memerlukan dukungan BI dalam memberikan acuan petunjuk teknis pelaksanaan, sehingga dicapai tingkat praktek akuntansi dan pelaporan keuangan yang dasar implementasinya memenuhi kesesuaian antara PA BPR dengan kerangka konseptual SAK ETAP. Dampaknya dapat menghasilkan isi laporan keaungan yang tidak berbeda, seperti perbedaan nilai aset BPR yang lebih kecil jika diperlakukan sesuai (SAK ETAP) dibandingkan versi laporan keuangan yang dikonversi ke dalam acuan PA BPR.

Perbedaan isi laporan keuangan yang ditimbulkan dari penerapan PA BPR dan SAK ETAP yang belum dijembatani dengan pedoman pelaksanaan teknis untuk konversi dalam proses akuntansi, juga terjadi pada tataran input pengelolaan keuangan BPR. Sesuai realitas, dalam penetapan RKAP ditetapkan versi SAK ETAP, namun dalam praktek pelaporan keuangan RKAP tersebut tersebut sebagai *financial prospective* harus disajikan sesuai PA BPR BI. Adanya

informasi yang memenuhi validitas dan reliabilitas diperlukan dalam memenuhi kebutuhan pemakai informasi. Bahwa informasi yang berbeda dalam penyajian aset BPR dapat memberikan dampak inefektifitas manfaat informasi bagi pemakai informasi, seperti Dewan Pengawas, Komisaris entitas BPR. Juga bagi pihak pengawas eksternal dalam fungsi audit keuangan pada entitas BPR.

Sesuai acuan SAK ETAP memberikan dasar rujukan isi aturan yang lebih rigit dan fokus pada kekuatan *historical cost.* Dengan pemenuhan laporan keuangan yang diproses rutin (harian) berbasis SAK ETAP dan pada akhir periode pelaporan harus dikonversi ke dalam acuan PA BPR, memerlukan penjelasan tambahan tentang perbedaan dari nilai aset yang dilaporkan. Diperlukan dukungan BI dalam memenuhi mekanisme pengembangan melalui penetapan pedoman sebagai petunjuk teknis yang digunakan sebagai acuan untuk penyesuaian/konversi dalam proses akuntansi, untuk menghasilkan satu laporan sebagai *general purposes information.*

Sesuai Tearney *et al.,* (1997) dalam suatu lingkungan akuntansi keuangan organisasi, diperlukan kegiatan untuk sosialisasi, pelembagaan aspek-aspek politik (regulasi), ekonomi, dan teori akuntansi untuk penerapan akuntansi keuangan yang *auditable*, dan memenuhi manfaat bagi lingkungan pemakai informasi organisasi. Implementasi SAK ETAP memerlukan kesesuaian dengan PA BPR dalam perspektif kesesuaian arah tujuan politik (isi regulasi), aspek kinerja/ekonomi, konteks sosial, dan Teknologi (PEST) dari lingkungan akuntansi BPR. Pendekatan pengembangan pedoman pelaksanaan PA BPR BI menjadi penting dipenuhi dan sebagai kebutuhan dari sisi eksternal organisasi dan/atau dari sisi entitas BPR sebagai pengguna SAK ETAP.

Diperlukan kajian dengan memilih sudut pandang Politik (regulasi), Ekonomi, Sosial, dan Teknologi (PEST) dari entitas Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kalimantan Selatan, sebagai fokus kajian pengembangan. Bagaimana Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat (PA-BPR) diderivasi dari acuan Kerangka konseptual SAK ETAP, Basis pengukuran dan penilaian, regulasi, dan prakteknya. Diperlukan kepatuhan pada kriteria pelaksanaan aktifitas yang memenuhi *sound practices accounting* dan pemenuhan output yang memenuhi manfaat kegunaannya bagi *users*.

Secara empirik suatu penelitian terkait BPR menunjukkan adanya variabel kendala BPR yang meliputi (1). Kendala internal BPR menyangkut hal-hal sebagai berikut : (a) Tingkat bunga, (b) Modal, (c) Lokasi kantor BPR, (d) Kualitas dan Pengelolaan SDM, (e) Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BPR, (f) Biaya operasional, (g) Skim kredit/produk BPR, (h) Mutu pelayanan yang diberikan oleh BPR. Sedangkan (2). Merupakan kendala BPR yang berasal dari eksternal antara lain, yang meliputi : (a) Kondisi ekonomi, (b) Peraturan yang membatasi, (c) Image BPR, dan (d) Prestise UMK jika menggunakan jasa/produk BPR (Herri, dkk, 2007). Kajian terkait tingkat penerapan akuntansi PD BPR menunjukkan aktifitas akuntansi yang belum didukung pedoman petunjuk pelaksanaan PA BPR dari BI. Adanya hambatan dalam aspek regulasi memerlukan upaya untuk kesesuaian antara konsep regulasi PA BPR BI dengan dengan Standar akuntansi (ETAP). dalam konteks Ekonomi terkait pemenuhan aspek perpajakan, secara sosial terkait komunikasi dengan pihak BI, Bank Pembanguan Daerah (*owners*), dan dalam konteks opimalisasi keputusan pembiayaan dalam pemberdayaan UKM. Untuk aspek teknologi terkait kesiapan implementasi *AISs* sebagai bagian dari *CBISs*. *CBISs* meliputi kajian aspek

melalui: *SIA, IRSs, DSSs*, dan *OAs*. Diperlukan sosialisasi, penetapan, dan pelembagaan pedoman PA BPR sesuai atau menenuhi kesesuaian dengan SAK ETAP sebagai perangkat Pedoman Kebijakan Akuntansi BPR, dan Disain Sistem Informasi Akuntansi dengan dukungan teknologi basis data, proses olah data dan informasi yang *fit* dengan kebutuhan *users*. (Syaiful, 2012).

Berdasarkan uraian di atas, penting dikaji implementasi SAK ETAP Pada BPR di Kalimantan Selatan. Implementasi dalam pemenuhan dan pelengkapan aspek-aspek PEST, melalui sosialisasi, penetapan, dan pelembagaan pedoman PA BPR dengan dukungan petunjuk teknis untuk konversi dalam penyajian laporan keuangan yang memenuhi kesesuaian antara acuan SAK ETAP dalam pemenuhan kesesuaian dengan acuan perangkat Pedoman Kebijakan Akuntansi BPR (PA BPR).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian dikemukakan sebagai berikut, bagaimana kebutuhan implementasi aspek politik (regulasi), aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek teknologi dalam implementasi SAK ETAP pada BPR di Kalimantan Selatan.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan, tujuan penelitian dikemukakan untuk mendeskripsikan implementasi aspek politik (regulasi), aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek teknologi dalam implementasi SAK ETAP pada BPR di Kalimantan Selatan.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dapat dicapai sesuai latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian adalah:

1. Untuk kontribusi keilmuan melalui kajian teori akuntansi aspek Standar Akuntansi dengan deskripsi model PEST pada entitas BPR di Kalimantan Selatan.
2. Untuk manfaat praktis bagi jajaran Perbankan (BI, BPD, BPR) dalam kebijakan pengembangan sistem akuntansi, dan kinerja sistem informasi keuangan entitas BPR di Kalimantan Selatan.
3. Untuk manfaat pengembangan penelitian ke depan dengan menetapkan variabel-variabel dalam penelitian ini maupun dengan perspektif variabel baru yang dikaji terhadap perspektif teori akuntansi dan sistem akuntansi keuangan, dan kinerja sistem informasi keuangan pada sektor perbankan.

BAB 2

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL

2.1. Landasan Teoritis

2.1.1. Lingkungan Akuntansi Keuangan

Implementasi akuntansi keuangan suatu entitas, merupakan perspektif organisasi dalam upaya mencapai pengendalian administrasi keuangan sebagai bagian dari pengelolaan keuangan entitas mengacu pada landasan regulasi yang diberlakukan. Dalam kajian teoritis, suatu implementasi praktek akuntansi keuangan memiliki perspektif lingkungan akuntansi, sebagaimana dikemukakan dalam gambar 2.1. (Tearney, *et al*, 1997:7), berikut:

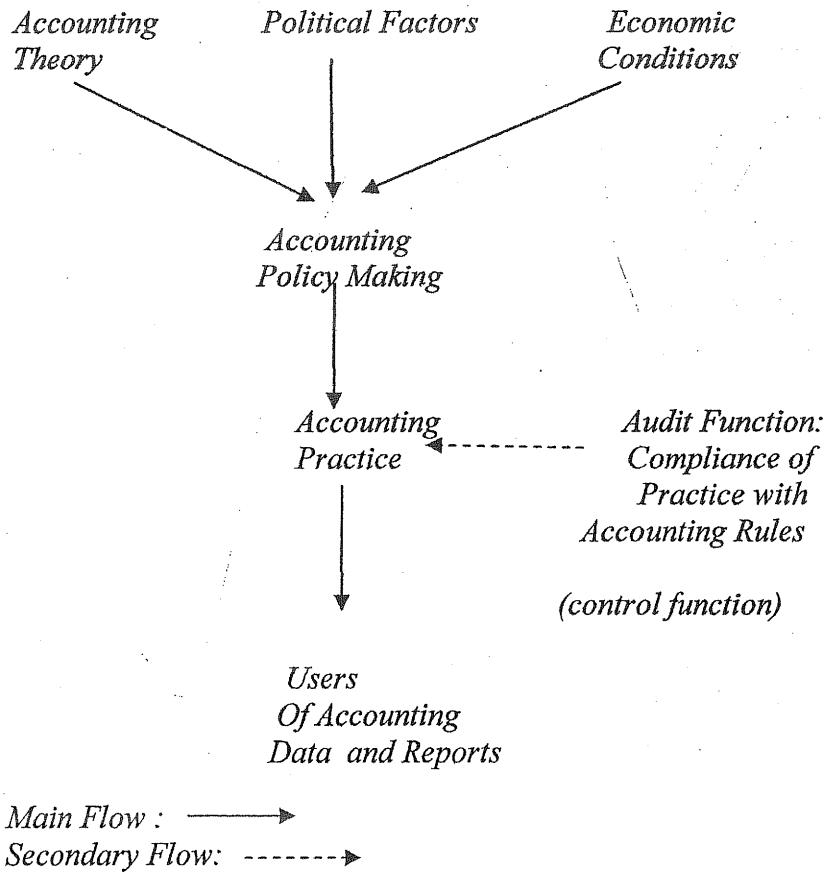

Gambar 2.1.
Exhibit-The Financial Accounting Environment

Sesuai perspektif model dikemukakan suatu telaah terhadap implementasi akuntansi keuangan adalah diarahkan dapat memenuhi manfaat informasi keuangan bagi *users*. Hal ini merupakan kebutuhan normatif bahkan pragmatis, karena adanya dinamika akuntansi keuangan yang berada dalam suatu lingkungan penerapan. Sesuai deskripsi di atas, lingkungan akuntansi keuangan tersebut meliputi, teori akuntansi sesuai perspektif kerangka konseptual yang menjadi acuan standar akuntansi yang diberlakukan, adanya faktor politik terkait regulasi pelaporan keuangan, dan kondisi ekonomi dalam perspektif keuangan negara/daerah di mana akuntansi keuangan menjadi alat akuntabilitas pelaporan. Faktor–faktor ini mempengaruhi pembuatan kebijakan akuntansi (*accounting policy making*) yang menjadi acuan praktek akuntansi keuangan.

Perspektif teori akuntansi mendeskripsikan setiap perubahan kebijakan akuntansi pada dasarnya dapat mengubah aktifitas operasi maupun pengembangan masing-masing entitas bisnis/organisasi yang bersangkutan. Didasarkan alasan tertentu organisasi mungkin melakukan perubahan kebijakan yang mempunyai pengaruh terhadap konsistensi dalam proses akuntansi dan pelaporan keuangan yang disebut dengan perubahan akuntansi. Ada tiga macam perubahan akuntansi yaitu :

1. Perubahan prinsip atau metode akuntansi (*change in accounting principle or methods*).
2. Perubahan taksiran akuntansi (*changes in accounting estimates*)
3. Perubahan kesatuan/subjek pelaporan (*changes in the reporting*).

Perubahan tersebut apakah terjadi dalam periode sekarang atau periode yang lalu yang dilakukan sekarang akan berdampak terhadap analisis akuntansinya, yakni terjadi penyesuaian atau perubahan terhadap laporan

keuangan organisasi yang harus dijelaskan/diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Dengan laporan keuangan yang berubah maka analisis terhadap laporan keuangan (rasio-rasio keuangan yang terkait terhadap akun tersebut) juga mengalami perubahan, akibatnya juga berpengaruh terhadap analisis keuangan (harga saham, dividen), dan selanjutnya akan akan berimplikasi pada analisis mengenai prospek organisasi.

Implementasi praktek akuntansi keuangan ditujukan untuk menghasilkan output berupa informasi keuangan. Informasi keuangan yang dihasilkan selayaknya memenuhi mutu sehingga bermanfaat untuk pemakaiannya bagi users. Suatu praktek akuntansi memerlukan penjelasan dari adanya praktek akuntansi yang dapat menghasilkan keseimbangan informasi, dapat dilakukannya mekanisme audit, dipenuhinya suatu mutu informasi yang berguna bagi jajaran *users.* Kriteria hasil audit menegaskan kepada users, penerapan akuntansi keuangan yang diimplementasikan entitas organisasi.

2.1.2. Aspek PEST Akuntansi

Implementasi akuntansi keuangan, berkaitan dengan pemenuhan sistem akuntansi keuangan dalam suatu lingkungan. Lingkungan tersebut dijabarkan dalam aspek Politik (regulasi), aspek Ekonomi, aspek Sosial dan aspek Teknologi (PEST) dari akuntansi. Sesuai Craig and Diga (1999) mendeskripsikan sistem akuntansi suatu negara yang memiliki 3 (tiga) aspek, yaitu:

> *"Broad Aims, Institutional Environment dan Accounting Rules and Practices. The broad aims of financial accounting (element 1), whether or not recognised explicitly, influence the way in which accounting-related institutions are organised and effect accounting regulation (element 2). Accounting institutions are associated with formulating and enforcing*

accounting rules and, in turn, directly influence the nature of national accounting practices (element 3)".

Tiga aspek tersebut meliputi tujuan yang luas dari sistem akuntansi keuangan, lingkungan kelembagaan dan aturan akuntansi dan praktek. Tujuan yang luas dari akuntansi keuangan, apakah secara eksplisit mengakui atau tidak pengaruh dalam hal akuntansi hubungan institusi diorganisir dan dampak regulasi akuntansi. Institusi akuntansi dihubungkan dengan perumusan dan penguatan praktek.

Akuntansi keuangan untuk sektor perbankan sebagai bagian dari tatanan sistem akuntansi keuangan, merupakan bagian dari siklus manajemen keuangan organisasi. Dalam hal ini penganggaran yang ditetapkan akan dipenuhi dengan *budgetary accounting* sebagai pemenuhan akuntabilitas pelaporan keuangan. *Budget* merupakan *Prospective* laporan keuangan. Penetapan RKAP karenanya memiliki kaitan dengan sistem akuntansi yang diberlakukan secara regulatif. Sesuai Craig and Diga (1999), sistem akuntansi keuangan dalam suatu lingkungan, memiliki penjabaran dan perberbedaan dalam suatu kerangka kerja yang komparatif. Hal tersebut dijabarkan melalui:

1. Orientasi pemakai (makro dan Mikro),
2. *Institutional Environment* yang meliputi: penetapan standar (*legalistic, hybrid, accounting profession, laissez faire)*, tingkat kepatuhan (*strong, moderate, weak*), dan *enforcement* (*punitive –government, punitive private, pereventive-government, preventive –private*),
3. *Specific rules & practices*, yang meliputi: *disclosure* (*uniform vs flexible, mandated vs voluntary, financial vs non financial*), *measurement* (*uniform vs flexible, conservative vs less conservative, accounting-driven vs tax –driven*).

(1) Orientasi peran akuntansi pemakai makro: dalam fungsi *national economic planning*, dapat dimaknai untuk meyakinkan kebijakan ekonomi pemerintah direpleksikan dalam penyajian akun-akun (*accounts*). Sedangkan orientasi peran akuntansi pemakai mikro: dalam fungsi *national economic planning* adalah peran yang bersifat insidental. Pemerintah umumnya secara tidak langsng mendasarkan akun-akun dalam penyiapan dasar perencanaan ekonomi nasional.

(2) Lingkungan kelembagaan sistem akuntansi, dalam penetapan standar akuntansi fokus pada legalistik (politik), dengan tuntutan yang kuat pada kepatuhan dalam penerapan. Penguatan peran regulasi diberikan meliputi *punitive* dan *preventive*. *Punitive methods* sebagai *ex post* terkait langkah yang diambil setelah adanya pelanggaran yang dideteksi. *Preventive methods* sebagai *ex ante* terkait langkah yang diambil untuk menghindari pelanggaran terhadap regulasi yang ada. Dalam sistem, di mana *preventive methods* dilaksanakan, antara lain dalam pemenuhan internal audit pada organisasi, penguatan auditor yang bersertifikat, penguatan pembiayaan dalam kondisi organisasi yang patuh pada regulasi akuntansi. Sedangkan dalam *punitive methods*, antara lain dapat berupa penuntutan atas pelanggaran (terhadap auditor dan manajemen), sanksi dalam sistem pembelanjaan, dan penerimaan.

(3) *Perspektif rules and practices*, meliputi pendekatan pengukuran dan pengungkapan. Sesuai Craig and Diga (2007), *nature and extent of disclosures* pada *macro-users oriented* adalah, batasan keuangan, pandangan yang luas pada aspek non keuangan. Dalam kaitan dengan pengukuran dan prinsip penilaian dalam orientasi pemakai makro adalah, *legally acceptable values, legal form of*

transaction is paramount; coservatism is emphasised; measurements adopted to achieve economic and social aims.

Implementasi akuntansi memerlukan perhatian pada peranan regulasi informasi akuntasi. Penelitian berikut memiliki keterkaitan dengan fenomena peran regulasi dalam implementasi akuntansi. Elliot dan Schueetze (1980): " Regulasi tidak boleh melanggar hak asasi atau undang-undang dasar. Kedua, regulasi harus dirancang untuk mencegah kemungkinan atau realitas perubahan sosial. Buckley dan Sullivan (1980): "mengidentifikasi adanya sejumlah kegagalan regulasi yang meliputi *zero-cost phenomenon* merupakan hasil dari kenyataan bahwa regulasi sama sekali tidak menanggung kerugian yang ditimbulkan dari kegagalannya". Regulasi diberlakukan untuk memenuhi implementasi sistem yang melibatkan berbagai pihak untuk menjaga hak dan kewajiban masing-masing pihak (*stakeholders*).

Kebutuhan penerapan akuntansi dan pelaporan keuangan memerlukan transparansi. Konsep pengungkapan menjembatani kebutuhan praktek akuntansi yang akuntabel. Konsep *disclosure* dikemukakan dalam kaitan dengan peraturan akuntansi yang spesifik pada tataran praktek akuntansi, sesuai (Nair *and* Frank, 1980) dalam Craig *and* Dida (1999), mengemukakan: *"Disclosure and "Measurement" are separated to accommodate possible differences in these items internationally. It seems important to do so in view of evidence that national patterns of disclosure practices differ from patterns of measurement practices.*

Perbedaan sudut pandang pada tipe pengungkapan *costs* dan *benefits* menghasilkan perbedaan yang besar dalam syarat pengungkapan dan praktek pelaporannya. Tidak hanya sifat dasar pengungkapan yang penting, tetapi juga adanya pola pengungkapan. Dalam hal ini pendekatan pengungkapan dinyatakan

pada tingkat dari *uniformtiy*, kewajiban atau suka rela, dan tingkat tekanan pengungkapan pada aspek keuangan dan informasi non keuangan.

2.1.3. *Uniform versus flexible disclosures*

Laporan keuangan disajikan berbeda di dalam lingkungan tertentu, seperti suatu negara dan di antara berbagai negara. Perbedaan dapat dikemukakan dalam susunan urutan penyajian yang ditetapkan, menerima apakah format horisontal atau format vertikal, dan penggunaan tingkat perbedaan pada rekening yang dikelompokkan. Tingkat fleksibilitas diijinkan dalam susunan laporan keuangan organisasi dan dalam kondisi sangat beragam pada pendefinisian kata kunci dan konsep dari suatu negara terhadap negara lain, dari suatu lingkungan entitas terhadap entitas, membuat sulitnya dilakukan *comparability*. Kecenderungan untuk menerima pendekatan pengungkapan yang sama dan terminologinya dipenuhi lebih besar pada lingkungan dengan sistem akuntansi yang *macro-users oriented.* Hal ini seperti pada sistem akuntansi pemerintahan di Indonesia, yang menstandarkan penggunaan kelompok rekening untuk tujuan kegunaan perencanaan ekonomi secara nasional. Pendekatan pengungkapan adalah juga fungsi dari *institutional settings.* Kecenderungan untuk *uniformity* penerapannya besar pada negara yang mengadopsi *a pure or a mixed-government approach to regulation.* Penggunaan *flexibility disclosure*, adalah untuk sistem akuntansi dengan *micro-user oriented*, di mana adanya asumsi kemampuan pelaporan keuangan terkait adaptasi secara cepat atas permintaan informasi yang berubah dalam *competitive market*. Penyajian yang fleksibel dipandang sebagai kebutuhan sehingga akun keuangan menyajikan relevansi peristiwa dari entitas. Sesuai (Baker *et. al*, 1977; Haller, 1992; Macharzina *and* Langer, 1995, dalamCraig *and* Diga, 1999), mengemukakan prinsip *materiality*

diminta untuk membiarkan kebijaksanaan yang lebih besar dalam sistem akuntansi yang *micro-user oriented.* Meskipun demikian, seperti di Indonesia, setiap detail persyaratan berdasarkan undang-undang harus diungkapakan tanpa memperdulikan jumlah dan perlakuan akuntansi sebagai aturan harus dipatuhi dengan tanpa perduli pada peristiwa individual.

2.1.4. *Mandatory versus Voluntary Disclosures*

Pengungkapan dapat dihasilkan dari setiap syarat keharusan (*mandatory*) yang dibekreditoran melalui badan penetapan standar atau respon atau pengungkapan yang sukarela (*voluntary*) terhadap perubahan yang disebabkan pasar dan pemicu sosial yang menimbulkan permintaan pada informasi. Hal ini mendasari penggerak penting untuk pentingnya suatu pengungkapan untuk menyediakan petunjuk untuk mereka yang terkait dan prioses terlibat dalam pengaturan praktek akuntansi (*accounting practices*). Luasnya pengungkapan *mandatory* adalah sesuai yang utama untuk tanda bahaya dan efektifitas sangsi regulasi, sedangkan *voluntary disclosure* disediakan biasanya dalam merespon tekanan pasar dan sosial terkait kebutuhan informasi.

Kebutuhan informasi bagi jajaran *users*, memerlukan pemenuhan efektifitas manfaat informasi keuangan. Sesuai *decision theory*, yang dikemukakan (Scott, 2006: 51), yaitu berhubungan dengan 2 (dua) pertanyaan, yaitu, pertama, siapa pemakai laporan keuangan. Mereka ini disebut *constituencies of accounting.* Kedua, apa problem keputusan dari *users*. Kemudian, sesuai Tearney *et al.* (1997: 7), mengemukakan konsep *Users of Accounting Data and Reports,* dalam lingkungan akuntansi keuangan. Konsep ini, bermakna pada pemenuhan efektifitas manfaat informasi yang memuaskan *users.* Suatu kriteria kualitas mutu dicapai, jika informasi

keuangan yang dikomunikasikan dapat berguna dalam pengambilan keputusan mereka, dan juga sesuai dengan manfaat informasi dalam problem keputusan yang diambil.

Dalam penerapan akuntansi keuangan, manajemen organisasi sesuai *agency theory* memiliki kekuatan pengetahuan dan penguasaan atas transaksi yang akan dilaporkan dibandingkan pihak lainnya. Hal ini berpotensi menimbulkaan adanya *information assymetry* antara *provider* dengan *users* dalam komunikasi informasi keuangan yang dihasilkan manajemen. *Perspektif adverse selection* dan *moral hazard* adalah:

> "suatu jenis *information asymmetry* dimana salah satu pihak atau lebih yang terlibat dalam suatu transaksi organisasi, atau suatu transaksi yang potensial, memiliki keunggulan informasi dibandingkan dengan pihak lainnya. *Moral hazard* adalah: suatu jenis *information asymmetry* di mana salah satu pihak atau lebih yang terlibat dalam suatu transaksi organisasi, atau suatu transaksi yang potensial, dapat mengamati tindakan-tindakan mereka dalam penyelesaian transaksi tersebut, sementara pihak lainnya tidak dapat. (Scott: 2006:11 & 12).

Dalam hubungan manajemen dengan pihak di luar manajemen, adanya *information assymetry* yang dinyatakan dalam *adverse selection* dan *moral hazard*, perlu diminimalisir, serta dihindarkan dengan suatu perspektif kepatuhan pada aturan akuntansi yang menjadi acuan, yaitu standar dan kebijakan akuntansi. Penyajian konteks Teori Akuntansi Keuangan adalah untuk menjustifikasi melalui koherensi, korespondensi, serta pragmatisme kebijakan akuntansi dalam pemenuhan praktek akuntansi organisasi yang memenuhi efektifitas manfaat informasi bagi *users.*

Manfaat informasi memerlukan kriteria mutu informasi. Kisi *relevance; reliable; prediction: confirmation value/feed back* (Ref: Kieso Intermediate Accounting ch 2: edisi IFRS). Sesuai paparan di atas, mengacu pada FASB , SFAC

No 2 dalam (Kam, 1986: 349), menyatakan *Usefulness of information for decision making*, konsep ini dinyatakan dengan karakteristik: *Relevance*, dan *reliability*. Relevan meliputi : *predictive value, feedback value, timelines*. Reliability meliputi: *verifiability, neutrality, representational faithfulness.*

Tujuan laporan keuangan yang dihasilkan dari akuntansi keuangan, menurut SFAC No. 1 tentang *Objectives of Financial Reporting By Business Enterprises*, tujuan pelaporan keuangan adalah :

a. Menyediakan informasi yang berguna bagi investor, kreditor, dan pengguna potensial lainnya dalam membantu proses pengambilan keputusan yang rasional atas investasi, kredit dan keputusan lain yang sejenis.
b. Menyediakan informasi yang berguna bagi investor, kreditor, dan pengguna potensial lainnya yang membantu dalam menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian prospek penerimaan kas dari dividen atau bunga dan pendapatan dari penjualan, penebusan atau jatuh tempo sekuritas atau pinjaman. Menaksir aliran kas masuk pada entitas organisasi.
c. Memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi, klaim atas sumber daya tersebut dan perubahannya.

Deskripsi berikut memiliki hubungan koherensi /korespondensi "artikulasi elemen pelaporan keuangan " Neraca dengan Laba/Rugi, konsepsi proses penyusunan dalam kerangka konsepsional yang dijelaskan:

> (Sorter, 1976): " Bahwa semua kejadian yang dilaporkan dalam laporan *income* juga dilaporkan dalam neraca meskipun dari perspektif yang berbeda". (Stamp Report/ Edward Stamp (1980): Satu tujuan utama laporan keuangan entitas organisasi yang dipublikasikan adalah menyediakan laporan tentang pelaksanaan fungsi penata layanan oleh manajemen dan juga keberhasilannya (atau kebalikannya) dalam mencapai tujuan menghasilkan kinerja ekonomi yang memuaskan oleh entitas organisasi dan memeliharanya dalam posisi keuangan yang kuat dan sehat. " pelaporan keuangan tidak hanya memuat laporan keuangan, namun juga cara – cara lain dalam mengkomunikasikan informasi yang berhubungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan informasi yang diberikan oleh sistem akuntansi- yaitu , informasi mengenai sumber daya, kewajiban, penghasilan entitas organisasi dan lain-lain (SFAC No 1/ Objectives of Financial Reporting by Business Enterprises).

Keputusan yag diambil memiliki kaitan dengan jenis dan isi informasi serta jumlah informasi yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan tersebut. Tujuan pelaporan keuangan sesuai dengan kerangka konsepsi, menunjukkan konsepsi manfaat keputusan bagi : investor, kreditor, dan manfaat bagi stakeholder yang lain.

2.1.5. Manfaat pelaporan keuangan

Pelaporan keuangan memberikan kegunaan bagi pihak-pihak terkait (*stakeholders*) yang dikemukakan antara lain:

a. Investor: informasi akuntansi keuangan untuk peningkatan, penurunan proporsi kepemilikan saham, juga evaluasi pengelolaan sumber daya oleh manajemen;
b. Kreditor: informasi dasar untuk penilaqian untuk melakukan perluasan kredit (extend credit), ukuran syarat keamanan penjaminan kredit;
c. *Stakeholder* yang lain:
    1. *Supplier*: peningkatan atau penurunan dasar pelanggan;
    2. *Taxing authorities*: evaluasi *tax returns*, investigasi dan audit pajak;
    3. *Employee: negosiasi "wages", prospective employees*
    4. *Customer*: antisipasi perubahan harga

Bagi investor informasi akuntansi yang diperlukan adalah dalam menilai pertumbuhan nilai saham sehingga dalam jangka pendek menjadi pendukung mencapai *capital gain*. Sedangkan untuk keputusan jangka panjang terkait kemampuan fundamental keuangan entitas organisasi, maka investor memerlukan informasi "kemampulabaan dan kebijakan deviden" untuk investor jangka panjang.

Investor memerlukan informasi yang bersifat "*Finer* dan *additional information*" untuk memenuhi keputusan dengan lingkup jangka pendek dan jangka panjang. Investor memerlukan informasi akuntansi yang berkualitas yang dihasilkan melalui entitas organisasi yang menerapkan acuan standar, sehingga dapat meyakinkan bahwa:

> " pelaporan keuangan tidak hanya memuat laporan keuangan, namun juga cara – cara lain dalam mengkomunikasikan informasi yang berhubungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan informasi yang diberikan oleh system akuntansi- yaitu , informasi mengenai sumber daya, kewajiban, penghasilan entitas organisasi dan lain-lain (SFAC No 1/ Objectives of Financial Reporting by Business Enterprises).

Para investor sangat memerlukan data akuntansi suatu organisasi untuk menganalisis perkembangan organisasi yang bersangkutan. Investor telah melakukan penanaman modal pada suatu usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan hasil, maka informasi akuntansi yang diperlukan adalah informasi tentang perkembangan ***dividen, aliran kas dan profitabilitas.***

Informasi akuntansi bermanfaat bagi investor dalam membantu mengestimate nilai yang diharapkan dan resiko atas return sekuritas. Jika informasi akuntansi tidak memiliki muatan informasi, maka tidak akan ada revisi kepercayaan setelah diterimanya informasi tersebut, dan karenanya tidak memicu pengambilan keputusan beli/jual. Tanpa adanya pengambilan keputusan beli/jual, tidak akan ada volume perdagangan atau perubahan dalam harga, dalam jangka pendek investor mengharapkan adanya *capital gain.* Pada intinya, informasi akan bermanfaat jika menyebabkan investor mengubah kepercayaan dan tindakan mereka. Lebih jauh lagi, tingkat manfaat bagi investor tersebut dapat diukur dengan besarnya perubahan harga atau volume setelah diumumkannya informasi yang bersangkutan.

Bagi kreditor informasi akuntansi yang diperlukan adalah sesuai perluasan tujuan pelaporan untuk berbagai users, termasuk kreditor, informasi yang diperlukan kreditor adalah informasi terkait pemenuhan syarat keamanan perjanjian dengan kinerja keuangan (untuk bayar bunga), Informasi likuiditas untuk kemampuan membayar kewajiban entitas organisasi, informasi solvabilitas untuk keamanan

utang jangka panjang. Kreditor penting dan ingin mengetahui perkembangan entitas organisasi setelah pinjaman diberikan. Kreditor harus selalu menilai kemampuan entitas organisasi mengembalikan pinjaman untuk memutuskan apakah harus memberikan tambahan pinjaman atau menarik pinjaman yang telah diberikan. Bagi calon kreditor informasi tentang entitas organisasi diperlukan untuk menilai resiko yang akan terjadi sebelum pinjaman diputuskan untuk diberikan. Dengan demikian informasi profitabilitas dan arus kas entitas organisasi sangat penting bagi kreditor.

Kepentingan manfaat informasi bagi pihak lainnya. Untuk pasar manajer informasi akuntansi yang diperlukan, terkait ukuran kinerja manajer. Pasar manajer memiliki kepentingan dengan informasi kinerja manajer dalam mencapai tingkat capaian sesuai kontrak keagenan dengan principal dan pada sisi reputasi manajer dalam mendukung pertumbuhan nilai saham entitas organisasi, melalui laba organisasi dalam *earning management.* Pasar manajer memerlukan informasi laba bersih sebagai ukuran kinerja manajer. Informasi untuk menunjukkan kemampulabaan dan gambaran penggunaan laba bersih sesuai kontrak kompensasi. Informasi yang disampaikan memotivasi manajer untuk bekerjalebih keras. Dengan ikatan dalam ketentuan kontrak tersebut, manajer akan berjuang mengambil "*incentive-compatibility*". Informasi akan "*symmetry*" saat kepentingan manajer dan pemilik (*principal*) sejajar, karena keduanya menginnginkan entitas organisasi berjalan dengan baik, melalui indicator informasi Laba Bersih dan reputasinya pada pasar manajer. Dalam lingkup pasar tenaga kerja manajer akan mengontrol manajer. Manajer yang mempunyai kemampuan yang jelek tidak akan laku, sebaliknya manajer yang sukses akan diburu oleh banyak entitas organisasi. Dengan demikian manajer akan banyak meningkatkan prestasi dengan jalan meningkatkan

nilai atau harga saham agar masa depan mereka selalu terjaga. Informasi tentang pendapatan bersih, karena berkaitan dengan kompensasi, bonus, tantiem, yang akan diterima oleh para manajer.

Peran Standar dan perspektif suatu kerangka konseptual memberikan dasar dalam operasionalisasi akuntansi, dan di mana belum ada pengaturan dalam petunjuk teknis, suatu praktek dapat dikembangkan sesuai pandangan *sound practice accounting*. Adanya acuan praktek akuntansi yang memerlukan pedoman kebijakan akuntansi dengan petunjuk teknis pelaksanaannya memerlukan perspektif kerangka konseptual sebagai acuan penguatan praktek akuntansi yang baik. Hal ini sebagai praktek akuntansi yang dapat memenuhi tujuan pelaporan keuangan.

Perspektif standar mengandung isi suatu kerangka konseptual akuntansi. Kieso and Weygandt, *Intermediate accounting*, Six Edition, John Willey & Sons, Inc. 1998, mengemukakan:

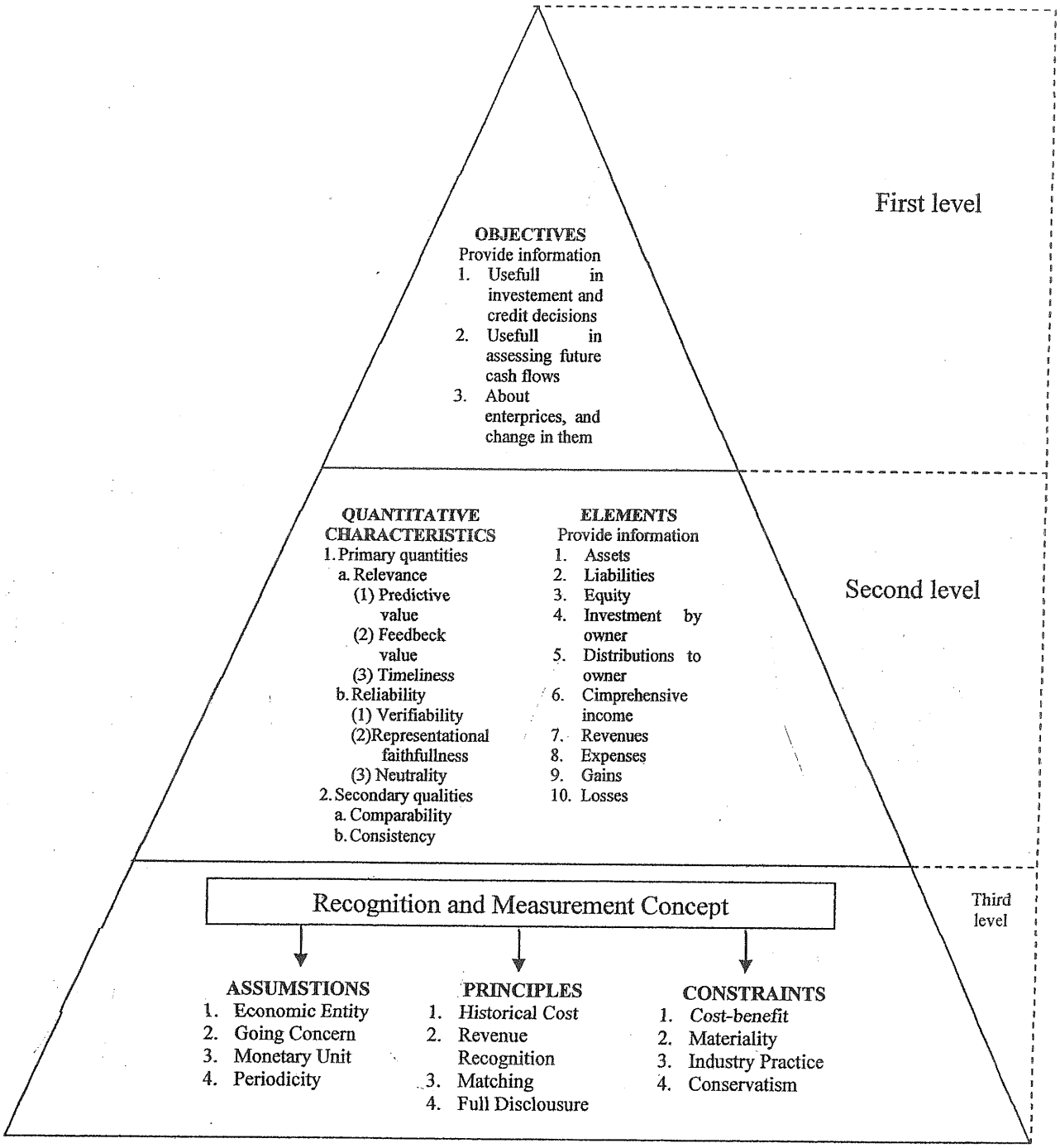

Gambar 2.2.
A Conceptual Framework for Financial Reporting

Kerangka konseptual akuntansi merupakan dasar fundamental akuntansi dan operasionalisasinya untuk menuju penyajian informasi akuntansi keuangan. Suatu Model kerangka konseptual, ditinjau dari tingkatan penerimaan teori sebagai standar, seperti dikemukakan:

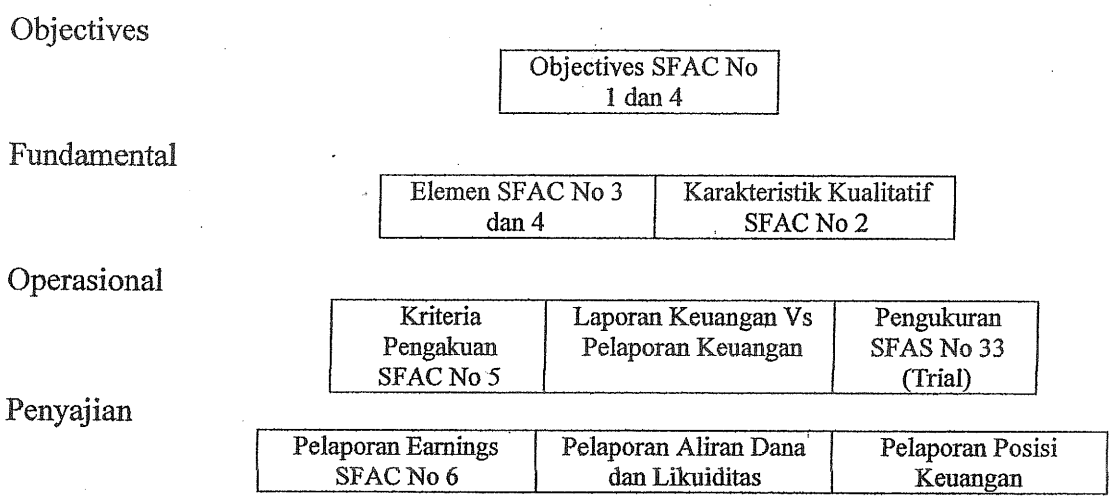

Gambar 2.3.
Model Kerangka Konseptual FASB
(FASB, 1982, dalam Ahmed Riahi Belkoui, dalam Marwata, dkk, 2000: 142)

Konsep objektif, fundamental, operasional, dan penyajian dijadikan landasan identifikasi untuk penetapan isi kebijakan di mana lingkup standar belum menetapkannya secara spesifik. Dalam tataran mutu informasi yang dikomunikasikan melalui acuan kebijakan akuntansi, meliputi kebutuhan pada karakteristik kualitatif informasi. Sesuai pernyataan FASB dalam SFAC No. 2, Karakteristik Kualitatif Informasi Akuntansi, menyediakan kriteria untuk memilih antara: metode akuntansi alternatif dan pelaporan; atau permintaan akan pengungkapan". (Adaptasi, Ahmed Riahi Belkoui, Dalam Marwata, dkk, 2000: 147).

Sesuai perspektif teori akuntansi positif, peranan informasi akuntansi dalam berbagai pengambilan keputusan. Teori akuntansi positif timbul karena peranan

informasi akuntansi dalam berbagai pengambilan keputusan, seperti keputusan users di dalam orientasi kepentingannya. Bahwa teori akuntansi positif berkenaan dengan mempredikasi tindakan-tindakan terkait pemilihan kebijakan akuntansi oleh manajer entitas organisasi dan bagaimana manajer merespon standar akuntansi yang diajukan otoritas akuntansi. Hubungan variabel ini dengan variabel lain (dalam relevansi isi kebijakan akuntansi) dikemukakan dengan mengadopsi pendapat :

> " ... *the theory is relevant to accounting practice . This is accomplished in two main ways. First, the various theories and research underlying financial accounting are described and explained in plain language, and their relevance is demonstrated by means of numerous references to accounting practice".* (Wiliam R Scoot, 2006, 15):

Relevansi teori atau kebijakan akuntansi terhadap praktek akuntansi pencapaiannya dilengkapi dengan 2 (dua) cara utama, pertama, dengan keragaman teori akuntansi yang ada dan hasil kajian dalam akuntansi keuangan yang digambarkan dan dijelaskan dengan bahasa yang jelas, dan relevansinya ditunjukkan melalui cara dari banyaknya acuan untuk praktek akuntansi, seperti kebijakan akuntansi.

Informasi akuntansi merupakan komoditas dan merupakan informasi ekonomi entitas organisasi. Kepentingan terhadap komoditas tersebut dan menghendaki informasi memenuhi sesuai kepentingannya. Kepentingan inilah yang menstimulasi produksi informasi. Suatu karakteristik informasi memerlukan pendorong dalam menghasilkan informasi, yang dikemukakan: ***Finer information***, memberi lebih banyak penjelasan pada laporan berbasis harga historis yang telah ada. ***Additional information,*** diperkenalkannya sistem informasi baru untuk melaporkan hal-hal yang tidak termuat dalam sistem harga historis. **Kredibilitas informasi,** penerima informasi mengetahui bahwa pemberi informasi memiliki insentif untuk melakukan pengungkapan sepenuhnya.

Informasi keuangan bermanfaat bagi pengguna, jika informasi keuangan tersebut dapat digunakan dalam menilai akuntabilitas serta pertimbangan dalam pembuatan keputusan. Terkait kebutuhan memenuhi efektifitas manfaat pada informasi akuntansi yang dikomunikasikan kepada pemakai, adalah sesuai dengan konsep *decision model,* seperti dikemukakan Kam (1986: 325), *The premise of the decision model is that accounting information must satisfy the informational needs of users.*

> ASOBAT (AAA, 1966): Agar informasi memenuhi standar relevan, informasi harus terkait dengan atau berguna dalam kaitannya dengan tindakan yang didisain untuk memfasilitasi atau menghasilkan informasi yang ingin dihasilkan. Ini mensyaratkan informasi atau tindakan pengkomunikasian yang mempunyai pengaruh ...pada bakal tindakan"
>
> SATTA (AAA, 1977) : Reliabilitas merujuk pada "kualitas yang memungkinkan pengguna data bergantung padanya dengan penuh keyakinan sebagai penyajian apa yang seharusnya disajikan".

Tantangan memenuhi mutu informasi dikemukakan, sesuai Merton (1987) serta Diamond dan Verrecchia (1991) : " Information asymmetry dinyatakan hanya sebagai pengetahuan sub kelompok investor mengenai masing-masing entitas organisasi. Akibatnya, investor tidak dapat melakukan diversifikasi penuh. Maka biaya modal entitas organisasi akan lebih besar dari yang ditentukan oleh CAPM". Kemudian, menurut Lang & Lundhom (1996): " riset menggunakan peringkat yang disusun oleh para analis keuangan untuk mengungkapkan kualitas, berdasarkan evaluasi laporan tahunan dan laporan kuartalan entitas organisasi dan hubungan investor , untuk sampel yang terdiri dari sejumlah besar entitas organisasi selama tahun 1985-1989".

Implikasi sosio-teknis membentuk aspek penerapan teknologi pelaporan keuangan organisasi. Aspek tersebut berhubungan dengan hubungan antar individu

(sosio), kondisi internal individu (psikis), aspek computer, dan aspek telekomunkasi yang dikembangkan organisasi. Hal ini dibutuhkan dalam menjustifikasi cost dari sisi ekonomis selain pertimbangan regulasi, dan teknis. Implikasi teknologi harus menjawab problem apa dan apakah problem yang dihadapi dalam manajemen informasi. Eksistensi teknologi merupakan cara pandang dari sisi input, proses, output, serta *outcome* dan *impact*.

Fokus pada tujan dari pelaporan keuangan yang dikemukakan, sesuai SFAC No.1 dapat diringkas sebagai-berikut :

1. Memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya dan bermanfaat bagi investor dan kreditor untuk dasar pengambilan keputusan investasi dan pemberian kredit.
2. Memberikan informasi posisi keuangan perusahaan dengan menunjukkan sumber-sumber ekonomi (kekayaan) perusahaan serta asal kekayaan tersebut (siapa yang mempunyai hak atas kekayaan tersebut).
3. Memberikan informasi keuangan yang dapat menunjukkan prestasi perusahaan dalam mengahasilkan laba (*earning income*).
4. Memberikan informasi keuangan yang dapat menunjukkan kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban-kewajibannya.
5. Memberikan informasi keuangan yang dapat menunjukkan sumber-sumber pembiayaan perusahaan.
6. Memberikan informasi yang dapat membantu para pemakai dalam meramalkan aliran kas masuk ke perusahaan.

Beaver *and* Demski (1974) menyatakan bahwa walaupun dalam kenyataan, para pemakai mempunyai berbagai macam tujuan, namun pendekatan akuntansi selama ini mengutamakan kepentingan grup pemakai yang paling dominan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Dopuch *and* Shyam Sumder (1980), menganjurkan hal sebagai berikut:

1. Hendaknya tujuan setiap kegiatan akuntansi adalah untuk melayani kebutuhan pemakai laporan keuangan.
2. Hendaknya rerangka konseptual memilih diantara beberapa alternatif akuntansi berdasar tujuan yang telah disetujui secara luas dan tidak memperhatikan semua kepentingan dari macam-macam kelompok yang berusaha berperan di dalam badan-badan yang berwenang dalam penyusunan standar akutansi.

Diperlukan syarat mutu output pelaporan keuangan yang mengacu pada SAK ETAP, dan syarat kelengkapan output /komponen laporan keuangan BPR yang memerlukan implementasi Sistem Informasi Manajemen berbasis Computer Bases Information Systems/CBISs, yang terdiri dari disain: Accounting Information Systems (AISs), Information Reporting Systems (IRSs), Decision Support Systems (DSSs)/Structured Decision Systems (SDSs), dan Office Automations (OAs). Aspek-aspek IT diperlukan dalam keberhasilan penerapan SAK ETAP dengan PA BPR pada entitas BPR. Hal ini dijrlaskan melalui orientasi pada aspek IT melalui akuntansi (Input, proses, output, serta identifikasi aspek-aspek kontingensi yang menentukan keberhasilan penerapan SIM BPR untuk penetapan disain: AISs, IRSs, DSSs/SDSs, OAs untuk suatu aplikasi program akuntansi dalam memenuhi kelengkapan output pelaporan dan mutu informasi.

2.2. Kerangka Konseptual

Berdasarkan kesesuaian dengan waktu penerapan, SAK ETAP diberlakukan sejak 1 Januari 2010, dan untuk BPR sesuai PA-BPR (pedoman akuntansi yang mengacu pada SAK ETAP) untuk BPR yang ditetapkan BI diberlakukan per 1 Juli 2010. Antara 1 Januari dan 1 Juli 2010, terdapat perbedaan perlakuan akuntansi, sehingga memerlukan penyesuaian (prospektif) mengacu PA- BPR:

a. Tidak mengakui pos laporan keuangan yang tidak sesuai PA BPR
b. Reklasifikasi pos-pos yang sebelumnya tidak sesuai dengan PA BPR
c. Dampak penyesuaian PA-BPR diakui dan dimasukan ke saldo laba awal tahun 2010: *deffered charge.*

d. Penyesuaian untuk transaksi yang muncul antara 1 Januari 2010 sampai 30 Juni 2010 (untuk yang tidak sesuai perlakuannya dengan PA BPR), penyesuaian untuk penyajian laporan keuangan BPR per 31 Desember 2010

e. Penyajian secara komparatif elemen pelaporan keuangan BPR (klasifikasi akun-akun laporan keuangan periodek disesuaikan dengan klasifikasi akun-akun periode tahun berikutnya).

2.2.1 Perspektif Kerangka Konseptual SAK ETAP

2.2.1.1. Konsep, Tujuan, Fungsi dan Peran Akuntansi dengan Standar ETAP

Menunjukkan kesamaan dengan SAK Umum (IFRS) dalam penyajian laporan keuangan sesuai dengan PSAK Nomor 1. Penjabaran tujuan pelaporan BPR didasarkan Pedoman Akuntansi BPR, yaitu:

Pedoman yang membantu pengguna (*users*) dalam menyusun laporan keuangan dengan tujuan sesuai tujuan pelaporan keuangan, yaitu:

1. Pengambilan keputusan ekonomi untuk *stakeholders:* deakunan, kreditur, pemegang saham, Bank Indonesia, otoritas Pengawasan, Pemerintah, lembaga penjamin Simpanan, Masyarakat.
2. Menilai prospek arus kas: informasi dalam perkiraan jumlah, saat dan kepastian dalam penerimaan kas di masa depan. Prospek hasil kas untuk memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo, kebutuhan operasional, reinvestasi dalam operasi, pembayaran dividen. Deakunan, investor, dan kreditur akan memaksimalkan pengembalian dana yang ditanamkan dengan penyesuaian pada potensi resiko financial.
3. Memberikan informasi terkait sumber daya ekonomi (sesuai *resources dependence theory*)

2.2.1.2. Konsep Fundamental Standar ETAP

Kesesuaian dengan karakteristik kualitatif informasi sebagai syarat mutu informasi dan identifikasi elemen/unsur/akun laporan keuangan.

a. Syarat mutu dalam kesesuaian dengan SAK Umum (IFRS).

b. Elemen laporan keuangan:

c. Aset, Kewajiban, Ekuitas;

d. Pendapatan; Beban termasuk keuntungan dan kerugian

e. Kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemiliki, dan arus kas

2.2.1.3. Konsep operasional Standar ETAP

Mengacu pada konsep operasional, pengakuan dan pengukuran dan penilaian yang didasarkan asumsi, prinsip, dan konstrain dalam normative perlakuan praktek akuntansi.

2.2.1.4. Acuan pada pendekatan Historical Cost.

SAK ETAP dengan modifikasi sesuai kebutuhan praktek di Indonesia dikemukakan independen terhadap SAK umum (SAK berbasis IFRS), hal ini bermakna SAK ETAP masih fokus pada "*Basic Concepts Underlying Historical Costing*".

Dalam kaitan dengan kerangka konseptual tersebut, (Tearney et all, 1997, menyatakan *postulates* dan *principles* berbasis *historical cost,* sebagai berikut:

POSTULATES	PRINCIPLES
1.Going Concern	Input-Oriented Principles
2.Time Period	* General Underlying Rules of Operation
3.Accounting Entity	1. Recognition
4.Monetary Unit	2. Matching
	*Constraining Principles
	1. Concervatism
	2. Disclosure
	3. Materiality
	4. Objectivity (also called verifiability
	Output-Oriented Principles
	*Applicable to Users
	1. Comparability
	*Applicable to Prepares
	1. Consistency

(Sumber: Tearney, 2002; 212)

Gambar 2.4
Basic Concept Underlying Historical Costing

Implementasi SAK ETAP menerapkan konsep dasar berdasarkan nilai historis dalam perlakuan akuntansi organisasi.

2.2.2. Konsep penyajian/pelaporan Standar ETAP

Penyajian laporan keuangan meliputi: Neraca, Laporan laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Neraca menyajikan akun yang lebih sedikit, elemen laporan keuangan silent terhadap akun luar biasa. Laba/Rugi (disajikan tanpa harus menyajikan laba/rugi komprehensif). Laporan Arus Kas (menggunakan metode tidak langsung).

Seperangkat regulasi BI dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan otorisator lainnya untuk entitas BPR, memerlukan pendekatan *ex-ante* dengan adopsi aspek-aspek yang menjadi acuan ke dalam Pedoman Akuntansi BPR.

2.2.3. Acuan SAK Akuntansi (PA BPR).

Kebutuhan *ex ante* tersebut (ref: PBI, Nomor 6/23/PBI/2004, tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan; PBI, Nomor 5/23/PBI/2003, tentang Penerapan Prinsip mengenal nasabah bagi BPR; SE, Nomor 6/19/DPBPR, April 2004 (Pedoman Standar Penerapan prinsip Mengenal Nasabah bagi BPR); SE Nomor 6/34/DPBPR, Agustus 2004 (Lembaga Sertifikasi bagi BPR). Antara lain:

a. Pemantauan rekening dan transaksi nasabah BPR
b. Laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK
c. (Pola transaksi tunai, penggunaan rekening BPR, transaksi pinjam meminjam)
d. Kebijakan pemantauan dan pelaporan
e. Kebijakan manajemen resiko
f. Prosedur pemantauan dan pelaporan (prosedur pemantauan rekening dan identifikasi transaksi; prosedur identifikasi transaksi keuangan mencurigakan; (*suspicious transactions*); prosedur pelaporan internal BPR dan pelaporan kepada PPATK: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan)

Ex ante untuk adopsi aspek-aspek tersebut ke dalam Pedoman Akuntansi BPR menjadi dasar dalam pengembangan Sistem : CBISs BPR untuk setiap aspek yang didisain sebagai kebutuhan pelaporan keuangan BPR (fungsi dan peran AISs: Laporan keuangan Pokok, Pelaporan eksternal; fungsi dan peran IRSs: pelaporan internal BPR, dan fungsi dan peran DSSs/SDSs). ***Ex post*** untuk adopsi aspek-aspek SAK umum dan SAK ETAP menjadi *regulatory intents* yang memerlukan kelengkapan adopsi kedalam struktur PA BPR.

Dalam masa transisi dan proses implementasi PA BPR didukung *CBISs* BPR, menimbulkan tantangan implementasi Sistem Akuntansi BPR, dalam memenuhi bentuk/format laporan sesuai BI dan sesuai SAK ETAP.

Situsasi informasional berkaitan dengan suatu mandatori dalam melaksanakan sistem akuntansi organisasi sesuai Pedoman Akuntansi (PA-BPR) yang mengacu pada SAK ETAP.

a. Implementasi pelaporan keuangan BPR sesuai PA-BPR yang mengacu SAK ETAP meliputi: Laporan Keuangan Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas,, Laporan Arus Kas; Catatan atas Laporan Keuangan.
b. Secara periodik mandatori pelaporan dipenuhi melalui Laporan tahunan BPR (sesuai SAK ETAP); Laporan Publikasi Triwulan (SAK ETAP); laporan Keuangan Bulanan (SAK ETAP).
c. BPR membuat laporan keuangan untuk stakeholders. Untuk BI dan pengguna lainnya BPR diharuskan melaporkan Akunisi keuangan, Kinerja, dan perubahan akunisi keuangan.
d. Laporan akunisi keuangan dipengaruhi oleh sumber daya ekonomi *(dependent resources theory)* yang dikendalikan, struktur keuangan, likuiditas, dan solvabilitas, serta tingkat kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Informasi dalam laporan akunisi berguna untuk *users* untuk mempredikasi kemampuan BPR dalam menghasilkan kas dan setara kas, kebutuhan investasi, distribusi imbal hasil dan arus kas, kemampuan BPR dalam memenuhi komitmen keuangan yang pada saat jatuh tempo, baik jangka pendek maupun jangka panjang. (Ref: Laporan Neraca BPR).

e. Laporan Kinerja. Laporan kinerja BPR digunakan untuk menilai perubahan potensi sumber daya ekonomi selama periode pelaporan yang mungkin dikendalikan ke depan. Informasi dalam laporan kinerja digunakan untuk memprediksi kapasitas BPR dalam menghasilkan arus kas dari sumber daya yang dimiliki, serta menilai efektifitas BPR dalam memmanfaatkan sumber daya. (Ref: Laporan Laba Rugi BPR).

f. Laporan perubahan Akunisi Keuangan. (1) Laporan Perubahan Ekuitas; (2) Laporan Arus Kas; (3) Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan perubahan ekuitas meliputi informasi peningkatan atau penurunan aset neto atau kekayaan selama periode pelaporan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu, yang digunakan entitas, dan yang harus diungkapkan dalam CaLK. Informasi dalam laporan terkait perubahan aset bersih dengan transaksi dari saham pemilik, jumlah laba/rugi kegiatan BPR. Laporan Arus Kas meliputi informasi arus kas dari aktifitas operasi, investasi, dan pembiayaan. Laporan Catatan atas Laporan Keuangan, informasi penjelasan atas penyajian pokok dalam elemen laporan keuangan, serta pengungkapan lainnya secara mikro dan makro.

Sesuai landasan teoritis, dan regulasi, serta kajian terkait dikemukakan Kerangka konseptual berikut:

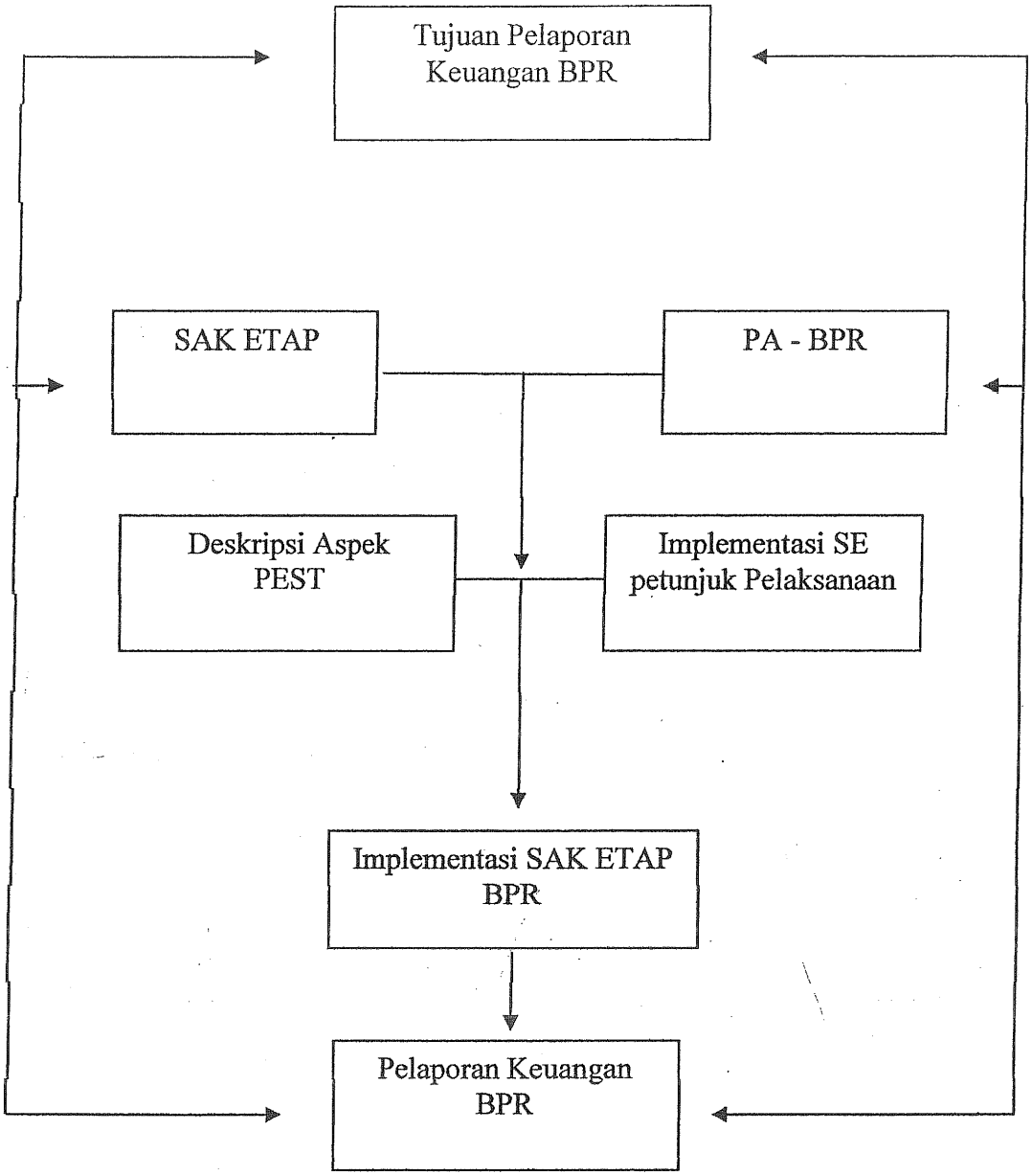

Gambar 2.5.
KERANGKA KONSEPTUAL

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dalam kaitan dengan aspek pengembangan acuan regulasi dalam sistem akuntansi dan pelaporan keuangan entitas BPR di Kalimantan Selatan. Mengaccu kepada kebutuhan implementasi pada aspek politik (regulasi), aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek teknologi dalam implementasi SAK ETAP pada BPR di Kalimantan Selatan.

3.2. Metode Penelitian

3.2.1. Jenis dan Sumber Data:

Data kualitatif data berupa regulasi dan kebijakan dalam pengelolaan sistem akuntansi BPR. Data kuantitatif berupa data akuntansi keuangan entitas BPR. Data bersifat primer dari hasil wawancara dengan pihak BI, BPR. Data sekunder terkait sumber data dokumentasi.

3.2.2. Teknik Pengambilan Data

Data primer diperoleh melalui wawancara dan *data gathering* sebagai pedoman wawancara. Dokumentasi data sekunder yang diperoleh dari sumber laporan, peraturan terkait manajemen PBR.

3.2.3. Populasi

Populasi penelitian ini adalah entitas akuntansi BPR di Kalimantan Selatan. Entitas berbentuk PD BPR, PT, dan BPR Syariah.

3.2.4. Aspek-Aspek Penelitian

Tabel 3.1
Aspek-Aspek Terkait Implementasi SAK ETAP pada Entitas BPR

No	Aspek	Uraian
1	Teknologi	Ketersediaan Fasilitas sarana dan Prasarana
		Teknologi Layanan
		Kebutuhan pengembangan fisik
		Metode Manajemen Pelaporan keuangan
2	Komunikasi (Sosial)	Komunikasi internal: Hubungan partisipasi penyusunan RKAP
		Komunikasi eksternal pelaporan keuangan
		Komunikasi internal pelaporan keuangan
3	Ekonomi	Kegunaan informasi dalam keputusan ekonomi
		Pemenuhan informasi keuangan (ukuran CAMEL)
		Kinerja ekonomi (informasi ukuran kinerja akuntansi) Informasi perlindungan sarana dan prasarana
4	Politik (regulasi)	Landasan regulasi yang tersedia
		Perspektif regulasi BPR
		Dukungan Kebijakan manajemen

(Sumber: Diolah tahun 2013)

3.2.5. Teknik Analisis

Data yang dikumpulkan diolah dan disajikan secara deskriptif dan analisis informasional.

BAB 4

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

4.1.1. Tinjauan Entitas Bank Perkreditan Rakyat

Sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 1998, definisi Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasar prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (Pasal 1, ayat 4). Secara pragmatis bank perkreditan rakyat adalah bank yang memiliki kekhususan dalam melayani keperluan masyarakat di wilayah pedesaan dan Usaha mikro Kecil (UMK) dalam bentuk simpanan (tabungan dan deposito) dan kredit. Batasan BPR dibandingkan dengan bank umum lainnya adalah BPR tidak dapat melakukan operasional keuangan dengan menerbitkan cek dan bilyet giro. Kemudian Wilayah operasional BPR terbatas hanya dalam satu provinsi yang sama, di mana BPR berdomisili.

4.1.2. Organisasi Bank Perkreditan Rakyat

Klasifikasi sesuai UU Pimpinan entitas BPR adalah Direksi untuk BPR berbentuk Perseroan Terbatas, BPR Perusahaan Daerah (PD), Pengurus untuk BPR berbentuk Koperasi. Komisaris adalah unsur supersistem di luar manajemen (Direksi) bagi organisasi BPR yang berbentuk Perseroan Terbatas dan bentuk Perusahaan Daerah, untuk BPR berbentuk Koperasi ada unsur Pengawas. Pejabat eksekutif adalah pejabat yang memimpin Kantor Cabang BPR, yang bertanggungjawab kepada Direksi. Kepemilikan BPR bisa Badan Hukum, Perorangan ataupun kelompok Usaha, yang dinyatakan ke dalam: Pemegang saham

pengendali, jika memiliki saham perusahaan atau BPR sebesar 25 % atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, Memiliki saham perusahaan atau BPR kurang dari 25 % dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian BPR, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Bentuk Hukum suatu entitas BPR dapat berupa: Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, atau Perusahaan Daerah (PD). BPR Perusahaan Daerah, merupakan BPR yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah (Daerah- Kabupaten/Kota), entitas lain yang punya kaitan dengan Pemerintah.

PD BPR Pemerintah Daerah memiliki ketentuan modal disetor yang dikemukakan pada pasal 4, ayat 1, poin (d), yaitu: Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) bagi BPR yang didirikan di wilayah lain di luar Wilayah sebagaimana disebut dalam huruf a, huruf b dan huruf c. Bagi manajemen BPR, ada ketentuan : paling sedikit 50 % dari modal disetor BPR wajib digunakan untuk modal kerja.

4.2. Deskripsi BPR Di Kalimantan Selatan

Entitas akuntansi BPR di Kalimantan Selatan meliputi BPR dengan bentuk kepemilikan serta sistem layanan yang terdiri dari: 1) PD BPR sebagai entitas BPR dengan kepemilikan saham Pemerintah Daerah, (2) BPR dengan kepemilikan saham swasta, (3) BPR dengan tipe layanan perbankan Syariah.

A. PD BPR – Propinsi Kalimantan Selatan (PERBAMIDA)

No	Entitas PD. BPR
1	BPR Kandangan
2	BPR Candi Laras Utara
3	BPR Tapin Tengah
4	BPR Tapin Utara
5	BPR Binuang
6	BPR Tapin Selatan
7	BPR-Labuan-Amas-Selatan
8	BPR Amuntai Tengah
9	BPR Amuntai Selatan
10	BPR Sungai Pandan
11	BPR Amuntai Utara
12	BPR Kelua
13	BPR Muara Uya
14	BPR Haruai
15	BPR Simpang Empat
16	BPR Sungai Tabuk
17	BPR Astambul
18	BPR Martapura
19	BPR Kabupaten Tanah Laut

B. PT BPR di Propinsi Kalimantan Selatan (PERBARINDO)

No	Entitas PT. BPR
1	PT BPR Gawi Sabumi Mandasari
2	PT BPR Mitratama Arthabuana
3	PT BPR Multidhana Bersama
4	PT BPR Dana Permata Lestari
5	

C. PT BPR Layanan Syariah Kalimantan Selatan

No	Entitas PT. BPR
1	PT BPR Berkah Gama Dana (Syariah)

4.2.1 BPR – Perusahaan Daerah

Bentuk Hukum suatu entitas BPR dapat berupa: Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, atau Perusahaan Daerah (PD). BPR Perusahaan Daerah, merupakan BPR yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah (Daerah- Kabupaten/Kota), entitas lain yang punya kaitan dengan Pemerintah.

4.2.1.1. Ketentuan Modal Disetor BPR Perusahaan Daerah

PD BPR Pemerintah daerah, memiliki ketentuan modal disetor ada pada pasal 4, ayat 1, poin (d), yaitu: Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) bagi BPR yang didirikan di wilayah lain di luar Wilayah sebagaimana disebut dalam huruf a, huruf b dan huruf c. Bagi manajemen BPR, ada ketentuan : paling sedikit 50 % dari modal disetor BPR wajib digunakan untuk modal kerja.

2.5. Visi dan Misi PD BPR

Penetapan Visi, Misi, Tujuan,dan sasaran adalah didasarkan pada: Sumber daya (*Resources*) , kegiatan bisnis (*Business*), system organisasi (*structure, system*, dan process), sehingga memberikan keuntungan bagi perusahaan (*Corporate advantage).* Hal ini merupakan implikasi dari kekuatan sumber daya, bisnis, dan organisasi dalam melingkupi tataran Visi, Misi, Tujuan, dan sasaran.

PD BPR menetapkan Visi, sebagai: suatu gambar yang dipertahankan dari apa yang perusahaan inginkan dihadirkan dan dalam istilah yang luas, apa yang diinginkan ini untuk pencapaian tertinggi dari peran PD BPR. Mengacu pada Visi PD BPR yang ditetapkan, penting dijustifikasi adanya:

- Pilihan dan tantangan orang dan membangkitkan harapan tentang kejelasan peran PD BPR di lingkungannya. Pernyataan visi yang efektif adalah, melalui:
  - Pihak internal dari berbagai struktur organisasi
  - Kejelasan ikatan untuk kondisi eksternal dan internal
  - Konsisten dengan keputusan strategik pimpinan dan tindakan-tindakan organisasi

Penetapan *Visi* merupakan tahap awal berpikir strategik dari organisasi. Pembahasan tentang *corporate strategy* dimulai dari visi, sehingga visi PD BPR

memainkan peran sentral dalam memformulasikan dan mengimplementasikan *corporate strategy.* Visi juga menggambarkan *ethical value organisasi.* Visi juga terkait dengan komunitas organisasi atau entitas dengan lingkungannya.

Misi: menunjuk bisnis atau bisnis-bisnis dalam hal mana PD BPR merencanakan untuk bersaing dan pelanggan yang direncanakan untuk dilayani. Misi PD BPR yang lebih kongkrit daripada visi organisasi, serta lebih efektif bilamana hal ini mendorong kuat pada pemenuhan standar etika. Misi adalah bagian/turunan dari visi yang merefleksikan kode perilaku anggota organisasi PD BPR.

Goals and Objectives:

Goals atau tujuan merupakan keinginan atau maksud yang kualitatif dalam kerangka waktu yang sama, seperti mengembangkan kemampuan membangun produk/layanan/*services* baru atau menjadi organisasi yang arahnya bertumbuh. Tujuan dinyatakan tidak dalam pernyataan kuantitatif.

Objectives atau sasaran : target kuantitatif yang dinyatakan dalam jangka pendek dan menengah. Seperti menjaga tingkat target tertentu dari aspek keuangan PD BPR. Sasaran dinyatakan secara kuantitatif. Goal atau tujuan dan objectives atau sasaran harus selaras dengan Visi dan Misi yang ditetapkan.

PT BPR Mitratama Arthabuana Kertak Hanyar berkedudukan di Jl. Ahmad Yani km.6,3 No.6 Kertak Hanyar, Kab. Banjar. Didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. E-6524 HT.01.01 tahun 1990 tanggal 15 Desember 1990 dengan nama semula PT BPR Taufiq Arta Banua kemudian dirubah menjadi Pt. BPR Mitratama Artabuana sesuai persetujuan Menteri Keuangan berdasarkan keputusan menteri keuangan RI no. Kep.252/Km.17/1995 tanggal 31 Agustus 1995.

Maksud dan tujuuan berdasarkan pasal 3 Menurut Akta pendirian, bidangusaha PT. BPR Mitratama Arthabuana adalah menjalankan usaha dalam bidang Bank Perkreditan Rakyat dengan menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut :

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk deposito berjangka dan tabungan.
- Memberikan kredit bagi pengusaha kecil atau masyarakat pedesaan.

Berdasarkan persyaratan dan kriteria dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), BPR memenuhi kriteria sebagai entitas tanpa akuntabilitas publik. Oleh karena itu manajemen perusahaan memutuskan untuk menerapkan SAK ETAP sebagai basis dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan perusahaan efektif tahun buku 1 Januari 2010.

4.3. Aspek Pengembangan Akuntansi

Aspek akuntansi merupakan hal esensial dalam memenuhi *Financial administrative Control* (akuntansi dan ukuran kinerja keuangan, akuntabilitas pengelolaan melalui audit), dan dengan tujuan *Financial Planning Control* (ukuran pertumbuhan keuangan organisasi). Aspek pengendalian administrasi keuangan diatur dengan suatu fungsi dan peran akuntansi yang diterapkan dengan mengacu pada aturan praktek. Aspek-aspek yang menentukan keberlangsungan sistem akuntansi dalam lingkungan organisasi ditentukan antara lain melalui lingkungan Politik (regulasi), sosial sebagai komunikasi atau interaksi manajemen dengan stakeholders, aspek ekonomi dalam kriteria informasi akuntansi yang menyajikan informasi ekonomis, informasi efektifitas, dan informasi efisiensi dalam ukuran kinerja akuntansi, serta aspek teknologi informasi.

4.3.1. Aspek Politik (Regulasi)

Aspek Politik (regulasi) PD BPR :

Regulasi bermakna suatu peraturan. Aspek regulasi merupakan peraturan tertulis yang dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ) yang mempunyai wewenang membuat "peraturan" yang berlaku umum atau mengikat umum atau *algemeen* (Yuliandri, 2009). Regulasi dikemukakan sebagai instrumen kebijakan yang bersifat *compulsory instruments* atau instrumen wajib untuk acuan pelaksanaan (Subarsono, 2006). Suatu regulasi yang ditetapkan dapat berbentuk standar, prosedur perijinan, larangan perilaku tertentu, dan perintah untuk melakukan tindakan.

Terdapat jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan dalam konteks sistem hukum nasional. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan tersebut meliputi: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; c. Peraturan Pemerintah; d. Peraturan Presiden; e. Peraturan Daerah (Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 10 tahun 2004). Berdasarkan tataran peraturan perundang-undangan, konteks regulasi merupakan salah satu aspek yang ada dalam lingkup peraturan perundang-undangan tersebut. Sesuai Hadjon (1994) yang mengemukakan, istilah peraturan perundang-undangan digunakan dalam pengertian yang sangat luas, meliputi: UUD, legislasi, dan regulasi (*delegated regulation*) (Yuliandri, 2009: 45). Pembentukan regulasi ini sesuai Bastian (2009) dinyatakan sebagai konteks regulasi terkait teknik penyusunan regulasi keuangan publik, yang bermakna, adanya rangkaian alur tahapan yang memiliki tingkatan sesuai otoritasnya, sebagai kerangka kerja dalam penetapan dan penerapan regulasi untuk akuntansi dan pelaporan keuangan.

Landasan Formil Kajian

Acuan praktek BPR mengacu pada kumpulan regulasi: UU RI Nomor 7 Tahun 1992, Tentang Perbankan, yang diperbaharui dengan UU RI Nomor 10 Tahun 1998: Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Peraturan BI, Nomor : 6/22/PBI/2004, tentang Bank Perkreditan Rakyat., UU Nomor 34 tahun 2004: Pasal 2 (5): UU Nomor 32 Tahun 2004: Pasal 11 (3): UU Nomor 34 tahun 2004: Perda PPD BPR (Nomor 12 Tahun 2008)

Fokus lingkungan makro adalah perspektif ekonomi dan moneter

Untuk memenuhi *prudential banking*, pemangku kepentingan memerlukan acuan keputusan dengan perspektif kebijakan moneter. Perhatian pada pemberdayaan manajemen PD BPR, bertumpu pada realitas masih rendahnya atau lambannya fungsi *intermediary* sebagai tantangan disfungsional dari fungsi intermediary PD BPR pada sektor riil UMKM dan masyarakat di perdesaan, kecamatan, kabupaten dalam regional provinsi. Padahal regulasi untuk pemberdayaan PD BPR cukup tersedia, dan dengan masuknya *new entrant* entitas perbankan dengan capital besar pada segmen pasar PD BPR memerlukan strategi untuk mengatasinya.

Kebijakan pemangku kepentingan (Pemerintah Daerah) tidak lepas dengan kondisi lingkungan dimana pengendali perbankan yaitu BI memberikan berbagai kondisi yang menjadi stabilisator praktek perbankan dalam fungsi (*intermediary*). Keputusan yang dipertimbangkan dilakukan seperti pemenuhan pembiayaan untuk menambah nilai investasi saham dipertimbangkan dalam kaitan dengan perluasan *economic scale* PD BPR dalam manajemen likuiditas dana /aktiva produktifnya. Rasionalisasi kebijakan pemangku kepentingan yang memerlukan keselarasannya dengan kebutuhan moneter di mana entitas PD BPR menjadi kelolaan kekayaan yang

dipisahkan dari instrumen APBD. Memerlukan pandangan keselarasan tersebut adalah dalam konteks :

Kerangka kerja kebijakan moneter BI yang terkait dengan *Inflation Targeting Framework* (ITF), arah kebijakan moneter, komitmen dan realisasi capaian kestabilan harga regional. Kerangka kerja kebijakan moneter BI dalam konteks *inflation targeting lite (ITL)* sebagai penerapan ITF secara parsial. Bukan dalam *full-fledge inflation targeting,* sebagai penerapan ITF secara penuh dengan komitmen. Acuannya dengan rumusan : Inflasi = f (jumlah uang beredar, kredit).

Telaahan pada : Lingkungan makro dalam transmisi moneter dan proses perputaran uang secara nasional dan regional, di mana: Bank Sentral melakukan pengendalian pada pasar uang (Rp), pasar uang (valas), serta kaitan dengan pasar modal. Kelolaan Aktiva di Neraca: NFA = *Net Foreign Assets* (NFA), *Net Claims to Government* (NCG), *Net Claims to Bank* (NCB) terhadap sisi pasiva dalam kelolaan : Uang Primer /*base money*, Operasi pasar terbuka (OPT) dan *Net Others Items* (NOI).

Sesuai perangkat regulasi BI melakukan operasi moneter untuk pengendalian uang beredar (M1, M2) dalam saluran transmisi (moneter langsung/saluran uang). Dalam hal ini perbankan: berada dalam ; pasar uang; pasar dana dan kredit . Perbankan melakukan kelolaan atas Aktiva: NFA, Reserves, Surat Beharga (SB), PAB (Pinjaman Antar Bank), Kredit yang diberikan, dan terhadap sisi pasiva dalam kelolaan uang beredar (M1, M2), dan ekuitas.

4.3.2.Aspek Sosial

Penyampaian Laporan Bulan merupakan proses sosial dari tanggungjawab *agent* atau manajemen BPR dengan pihak penerima laporan atau *principal*. Sesuai SE BI Nomor 15/20/DKBU Tertanggal 22 Mei 2013 perihal Laporan Bulanan Bank

Perkreditan Rakyat, dikemukakan aspek sosial dalam bentuk : PENYAMPAIAN LAPORAN BULANAN DAN/ATAU KOREKSI LAPORAN BULANAN. Deskripsi komunikasi sosial antara manajemen BPR dengan pihak terkait entitas meliputi:

A. BPR Pelapor menyampaikan Laporan Bulanan kepada Bank Indonesia secara on-line melalui fasilitas ekstranet Bank Indonesia atau sarana teknologi lainnya paling lambat tanggal 14 pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan.
B. BPR Pelapor menyampaikan koreksi Laporan Bulanan kepada Bank Indonesia secara on-line melalui fasilitas ekstranet Bank Indonesia atau sarana teknologi lainnya paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan.
C. Dalam hal BPR Pelapor belum menyampaikan Laporan Bulanan dan/atau koreksi Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B, BPR Pelapor tetap harus menyampaikan Laporan Bulanan dan/atau koreksi Laporan Bulanan kepada Bank Indonesia secara on-line sampai dengan akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan.
   Contoh:
   BPR A hanya dapat menyampaikan Laporan Bulanan dan/atau koreksi Laporan Bulanan secara *on-line* untuk data bulan Juni 2013, paling lama sampai dengan akhir bulan Juli 2013.
D. Bagi BPR Pelapor yang menyampaikan Laporan Bulanan dan/atau koreksi Laporan Bulanan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf C, BPR Pelapor tersebut tetap dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Bulanan dan/atau koreksi Laporan Bulanan.
E. Dalam hal BPR Pelapor tidak menyampaikan Laporan Bulanan dan/atau koreksi Laporan Bulanan kepada Bank Indonesia sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf C maka BPR Pelapor tersebut dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Bulanan dan/atau koreksi Laporan Bulanan.
F. Laporan Bulanan dan/atau koreksi Laporan Bulanan yang disampaikan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf C hanya dapat disampaikan secara *off-line* dalam bentuk CD atau media perekam data elektronik lainnya disertai hasil validasi, kepada Bank Indonesia yang mewilayahi kantor pusat BPR Pelapor.
G. Untuk mendapatkan pengecualian penyampaian Laporan Bulanan secara *on-line*, BPR Pelapor menyampaikan pemberitahuan secara tertulis beserta alasannya kepada Bank Indonesia yang mewilayahi kantor pusat BPR Pelapor.
H. Dalam hal BPR Pelapor merupakan kantor cabang BPR, pemberitahuan dilakukan oleh kantor cabang BPR tersebut kepada Bank Indonesia yang mewilayahi kantor pusat BPR dimaksud, dengan tembusan kepada kantor pusat BPR Pelapor.
   Contoh:
   BPR A berkantor pusat di Surabaya memiliki kantor cabang di Jember. Apabila kantor cabang BPR A tidak dapat menyampaikan Laporan Bulanan secara *on-*

line maka pemberitahuan untuk mendapatkan pengecualian penyampaian Laporan Bulanan secara *on-line* disampaikan oleh kantor cabang BPR A kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Surabaya, dengan tembusan kepada kantor pusat BPR tersebut.

I. Dalam hal BPR Pelapor menyampaikan Laporan Bulanan dan/atau koreksi Laporan Bulanan secara *off-line* maka Laporan Bulanan disampaikan dengan menggunakan *compact disk* (CD) atau media perekam data elektronik lainnya disertai hasil validasi yang telah ditandatangani oleh penanggung jawab dan disampaikan kepada Kantor Pusat atau Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang mewilayahi kantor pusat BPR Pelapor.

J. Dalam hal terjadi kerusakan CD atau media perekam data elektronik lainnya yang telah diterima oleh Bank Indonesia secara off-line, BPR Pelapor menyampaikan ulang CD atau media perekam data elektronik lainnya tersebut.

Lingkungan Sosial:

Aspek pendidikan; Aspek kesehatan; Sosial lainnnya (kemiskinan, ketertinggalan). Isu kemiskinan menjadi sentral di perdesaan, karenanya ada perspektif tantangan menjadi peluang dari sistem koordinasi kelembagaan. Dalam peluang entitas bank untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan dan sektor UMKM, dinyatakan dengan dukungan: 4 faktor: *resources endowment*; *cultural endowment*; *technology,* dan *institutions*. PD BPR adalah institusi kelembagaan dunia usaha, dan shareholders pemerintah adalah kelembagaan pemerintah, dan masyarakat dan sektor UMKM adalah kelembagaan masyarakat.

4.3.3.Aspek Ekonomi

Dalam teori ekonomi, ukuran ekonomis, efektifitas, dan efisiensi menjadi sentral analisis dari keberhasilan pengelolaan. Proses penerapan regulasi dan komunikasi (*social*) manajemen dalam pelaporan keuangan BPR dikemukakan meliputi: syarat kegunaan informasi untuk pertanggungjawaban pengelolaan, pengurusan (*stewardship*), manajerial, dan ukuran kinerja dalam audit. Informasi yang dikomunikasikan dalam ukuran CAMEL memerlukan syarat standar acuan dan kebijakan akuntansi BPR yang diterapkan secara melembaga. Kebutuhan pada

petunjuk pelaksanaan kebijakan akuntansi PA BPR diperlukan sebagai syarat praktek akuntansi yang memenuhi manfaat informasi untuk pemakainya.

a. Assessment: Indikator Rasio Keuangan PD BPR

1. CAPITAL

CAR > 8 %

No	Entitas PD BPR	Aspek Modal	Indikator CAR	2007	2008	2009	2010	2011
1	Martapura			67%	65,14%	62,74%	72,82%	54,15%
2	Sungai Tabuk			30,12%	36,66%	43,75%	58,66%	46,50%
3	Simpang Empat			40,68%	43,36%	43,75%	39,18%	40,20%
4	Astambul			61,00%	60,63%	51,77%	68,40%	69,11%

Perhitungan CAR: Equity Capital/ Total Loans +Securities X 100 %

Capital Adequacy Ratio (CAR): Indikasi kerugian yang ditanggung bank dari kredit yang bermasalah akan mengurangi jumlah modal sendiri. Selanjutnya menurunnya jumlah modal sendiri akan menurunkan jumlah persentase CAR. Atas kondisi ini, manajemen bank harus memasukan dana modal (investasi saham), jika tidak maka tingkat nilai kesehatan bank akan menurun atau terhambat.

b. *CAPITAL* : SAHAM

Capital/saham perlu mencapai syarat peraturan perundang-undangan. Sesuai deskripsi jumlah setoran modal akan menentukan CAR BPR.

c. *ASSETS QUALITY*

Pertumbuhan Kredit (>10 %)

No	Entitas PD BPR	Aspek AQ	Indikator PK	2007	2008	2009	2010	2011
1	Martapura			25,39%	29,83%	21,31%	32,12%	38,53%
2	Sungai Tabuk			100,63%	20,29%	-6,46%	24,58%	103 %
3	Simpang Empat			44%	31,63%	16,65%	37,97%	34,46%
4	Astambul			23,63%	19,57%	35,39%	13,03%	5,14%

PK= Jlh Kredit th akhir - Jlh kredit th sebelumnya/Jlh kredit tahun sebelumnya X 100% .

Pertumbuhan kredit yang dicapai menunjukkan trend positif. Dalam hal pengembangan masih sangat potensial untuk dapat ditingkatkan.

d. Pertumbuhan DPK (> 5 %)

No	Entitas PD BPR	Aspek Likuiditas	Indikator DPK	2007	2008	2009	2010	2011
1	Martapura			37,05%	14,62%	40,60%	11,03%	61 %
2	Sungai Tabuk			43,40%	23,09%	19,80%	25,14%	63,70 %
3	Simpang Empat			90%	17%	32,74%	60%	11,77 %
4	Astambul			28,69%	42,72%	31,52%	15,99%	-1,28%

Pertumbuhan DPK = Jlh DPK th akhir – Jlh DPK th sebelumnya/ Jlh DPK tahun sebelumnya X 100%

Pertumbuhan DPK memberikan dampak pada potensi pemenuhan aktiva produktif. DPK dipenuhi dari masyarakat dan adanya penempatan dari pihak perbankan lainnya pada PD BPR.

e. Aset/Kualitas Aktiva Produktif

NPL (< 5 %)

No	Entitas PD BPR	Aspek Aset	Indikator NPL	2007	2008	2009	2010	2011
1	Martapura			2,89%	6,14 %	4,28%	3,17 %	3,15%
2	Sungai Tabuk			12,10%	14,76%	10,48%	6,46%	4,37%
3	Simpang Empat			1,55%	2,22 %	3,05%	2,75%	2,51%
4	Astambul			7,90%	5,91%	5,52%	4,00 %	2,07%

NPL: SE BI No 26/4/BPPP, 29 mei 1993: 4 (empat) kualitas kredit untuk BPR, yaitu criteria: Lancar (L), Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), dam Macet (M).
Rumus perhitungan= KL, D, M X 100 % / Total kredit yang diberikan

M : Kriteria diragukan, dan dalam waktu 21 bulan belum ada pelunasan atau usaha penyelematan kredit; kredit yang telah diserahkan ke PN atau BUPN, atau diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi.

D : Kredit masih bisa diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75 % dari hutang pinjaman, termasuk bunganya; kredit tidak

dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100 % dari hutang pinjaman.

KL : Kredit dengan angsuran pokok yang melampaui 1 bulan dan belum melampaui 2 bulan bagi kredit yang dengan masa angsuran kurang dari 1 bulan; melampaui 3 bulan dan belum melampaui 6 bulan bagi kredit yang masa angsurannya ditetapkan bulanan, dua bulanan, dan tiga bulanan; melampaui 6 bulan tetapi belum melampaui 12 bulan bagi kredit yang masa angsurannya ditetapkan 6 bulan atau lebih; Terdapat tunggakan bunga yang melampaui 1 bulan tetapi belum melampaui 3 bulan bagi kredit yang angsurannya kurang dari 1 bulan dan melampuai 3 bulan tetapi belum melampaui 6 bulan bagi kredit yang angsurannya lebih dari 1 bulan.

L : Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok, tunggakan bunga atau cerukan karena penarikan; terdapat tunggakan pokok tetapi belum melampaui 1 bulan kredit yang ditetapkan angsurannya kurang dari 1 bulan; belum melampaui 3 bulan bagi kredit yang ditetapkan angsurannya bulanan; belum melampaui 6 bulan bagi kredit yang masa angsurannya ditetapkan 4 bulan atau lebih; terdapat tunggakan bunga tetapi belum melampaui 1 bulan bagi kredit yang madsa angsuranya kurang dari 1 bulan dan belum melampaui 3 bulan bagi kredit angsurannya lebih dari 1 bulan.

f. *MANAGEMENT*

Organisasi dan manajemen PD BPR, dibentuk dengan mengacu pada kebutuhan pengelolaan aspek-aspek perbankan dengan konsep prudential banking. Organisasi manajemen PD BPR ditetapkan dengan acuan regulasi di bidang perbankan dari BI, Peraturan Perundang-undangan, termasuk Peraturan daerah.

Tujuannya adalah untuk memberikan legitimasi batas kewenangan dan tanggungjawab dari agent (manajemen PD BPR) dengan pihak pemangku kepentingan atau principals. Secara kelembagaan organisasi dan manajemen memiliki strategi dalam mencapai tujuan. Pada titik capaian yang optimal adalah dalam mencapai target ukuran kinerja yang ditetapkan. Kinerja adalah fungsi dari strategi yang dijalankan organisasi dan manajemen.

g. Deskripsi manajemen PD BPR

***Good Corporate Governance* (kondisi akhir dalam 2011)**

No	Entitas PD BPR	Aspek Manajemen	Indikator Governance	CAMEL	ETAP	SDM	SO
1	Martapura			B	C	B	CB
2	Sungai Tabuk			B	C	B	CB
3	Simpang Empat			SB	C	B	CB
4	Astambul			B	C	B	CB

Konsep *governance* dapat dijelaskan sesuai pemenuhan Indikator: *transparancy* : (*on line system* ke KBI); Kesehatan dengan criteria CAMEL (*Capital, Assets Quality, Management, Earnings, Liquidity*)/ Kepatuhan pada syarat indikator keuangan: Kepatuhan pada syarat kegiatan atau usaha yang sesuai serta tidak bertentangan dengan larangan kegiatan dan usaha BPR sesuai UU perbankan. (analisis diskriminan, dengan kinerja rasio-rasio keuangan PD BPR): baik. Kepatuhan SAK-ETAP; Cukup. Kompetensi SDM (kualitas, Jumlah sesuai kebutuhan Standar Operasional); Cukup Baik (CB).

Analisisi Input PD BPR: Kebutuhan dana, SDM, Skill,Management, IT

PD BPR meliputi : Sub sistem Organisasi, Sub system Operasional, dan Sub Sistem Informasional;

(1) Sub Sistem Organisasi

Struktur organisasi dan job deskripsi perusahaan, yang terdiri dari : Dewan Pengawas, Direksi, Akuntansi, Customer Services, Marketing, Security, Pelaksana administrasi dan keuangan, kasir, analis kredit.

(2) Sub Sistem Operasional;

Aktifitas perusahaan pada layanan pemenuhan jasa, produk,

- Proses menghimpun dana dari masyarakat sebagai dana pihak ketiga, dalam bentuk simpanan berupa deakunito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu
- Proses memberikan kredit dalam berbagai bentuk, skema kredit
- Proses menyediakan pembiayaan dan penempatan dana dengan *prudential banking,*
- Proses menempatkan danay dalam bentuk SBI, deakunito berjangka, sertifikat deakunito, dan atau tabungan dalam bentuk lain

(3) Sub Sistem Informasional:

Sistem informasi manajemen perusahaan. Dalam lingkup sub sistem akuntansi keuangan, BPR memerlukan pemenuhan pelaporan keuangan utama dan kandungan informasinya, yang sesuai dengan sudut pandang teori *entity (Sesuai SAP) dengan penerapan ETAP.* Laporan keuangan utama entitas BPR disusun mengacu pada SAK ETAP.

No	Aspek Penyajian	SAK ETAP
1	Elemen Pelaporan Keuangan	- Akun dalam Neraca lebih sedikit - Tidak memasukan pos luar biasa - Laba/Rugi tidak mensyaratkan laporan komprehensif (*extraordinary accounts*) - Laporan Arus Kas menggunakan metode tidak Langsung
2	Aset Tetap dan Properti Investasi	- Menggunakan metode biaya, kecuali ada ketentuan pemerintah yang mengharuskan menggunakan metode /model revaluasi.
3	Aset Tidak Berwujud (intangible assets)	- Perlakuan dengan amortisir 10 tahun - Pengukuran dengan metode cost
4	Instrumen Keuangan	Ruang lingkup: untuk investasi pada surat berharga tertentu
5	Penurunan nilai aset	Semua jenis asset, kecuali untuk pension plan - Tidak ada mengatur penurunan nilai goodwill - Mengatur penurunan nilai untuk kredit yang diberikan dan piutang yang menggunakan PSAK No 31
6	Laporan Keuangan Konsolidasian	- Tidak diatur dalam ETAP - Jika memiliki investasi atas asosiasi ataupun subsidiary digunakan metode ekuitas
7	Sewa	Akuntansi Lessee dan lessor menggunakan PSAK No 30: Akuntansi Sewa
8	Biaya Pinjaman	Biaya pinjaman langsung dibebankan
9	Pajak	Pajak penghasilan: tax payable concept Tidak ada differed taxes (pajak tangguhan)

Implementasi standar ETAP diperlukan pada jajaran BPR untuk memenuhi laporan keuangan yang akuntabel. Laporan keuangan yang memenuhi criteria kepatuhan perlakuan akuntansi pada standar/kebijakan akuntansi perbankan, penerapan sistem kode rekening, pengakuan nilai transaksi secara konsisten, kelengkapan informasi melalui pengungkapan informasi pokok dari laporan keuangan.

Kinerja Output BPR

- Layanan produk perbankan BPR, yang sulit atau tidak memiliki akses ke bank umum;
- Layanan dalam membantu pemerintah mendidik masyarakat dalam memahami pola nasional, regional sesuai akselerasi pembangunan di perdesaan-kecamatan.

- Layanan dalam komunikasi pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan lembaga keuangan formal, sehingga terhindar dari sistem tidak resmi rentenir

(Produk/Jasa : Kredit, Tabungan, Deposito, PUB)

Laporan Keuangan BPR (Berbasis SAK ETAP)

- Neraca (Balance Sheet) berisi informasi elemen Aset, Kewajiban, Ekuitas,
- Laba/Rugi (Income Statement) berisi informasi elemen pendapatan, beban, gain, losses,
- Laporan Arus Kas (Cash Flow) berisi informasi arus kas masuk dan keluar untuk operasional, investasi, dan pendanaan/pembiayaan,
- Catatan Atas Laporan Keuangan (Notes to Financial Statement) berisi informasi penjelas pos laporan keuangan lainnya.

Laporan keuangan utama sesuai pandangan teori ekuitas:

Entity: Karena entitas bertanggungjawab pada klaim pemilik ekuitas, teori entitas identik dengan "berpusat pada income". Karenanya teori ini focus pada Laporan Laba/Rugi perusahaan.

Laporan Laba/Rugi meliputi informasi tentang pendapatan, dan beban, serta pos extraordinary (gain dan losses).

Kandungan informasi akuntansi "Entity" adalah pelaporan income dengan matching principle, yaitu laba akuntansi untuk pertumbuhan entitas/perusahaan. Informasi untuk pemilik dan kreditor adalah informasi dalam pos dividen, bunga yang dibayarkan.

- Neraca (Balance Sheet) berisi informasi elemen Aset pemilik, Kewajiban pemilik, Ekuitas pemilik.

Tujuan pelaporan keuangan sesuai dengan kerangka konsepsi

1. Manfaat bagi investor
2. Manfaat bagi kreditor
3. Manfaat bagi stakeholder yang lain

Manfaat pelaporan keuangan bagi:

a. Investor: informasi akuntansi keuangan untuk peningkatan, penurunan proporsi kepemilikan saham, juga eyaluasi pengelolaan sumber daya oleh manajemen;

b. Kreditor: informasi dasar untuk penilaian untuk melakukan perluasan kredit (*extend credit*), ukuran syarat keamanan penjaminan kredit;

c. Stakeholder yang lain:

- Supplier: peningkatan atau penurunan dasar pelanggan;
- Taxing authorities: evaluasi tax returns, investigasi dan audit pajak;
- Employee: negosiasi "wages", prospective employees
- Customer: antisipasi perubahan harga

h. *EARNING*

Ekonomis : Rentabilitas/ROA (> 1.3 %)

No	Entitas PD BPR	Aspek Rentalitas	Indikator ROA	2007	2008	2009	2010	2011
1	Martapura			5,62%	5,87%	6,00%	6,95%	6,17%
2	Sungai Tabuk			2,81%	5,97%	6,11%	6,94%	6,36%
3	Simpang Empat			5,41%	5,91%	6,31%	10,22%	6,86%
4	Astambul			7,00%	8,00%	6,63%	7,12%	8,21%

ROA = Operating Income/Total Assets X 100 %

Sebagai Rentabilitas Ekonomis, yang menunjukkan ukuran kemampuan manajemen bank menjalankan operasional bank secara efektif dan efisien dalam menggunakan sumber-sumber (total asset) untuk mengembangkan usaha supaya dapat menghasilkan pendapatan bank secara optimal.

i. **Rentabilitas/ROE**

ROE > Cost of Capital

No	Entitas PD BPR	Aspek Rentalitas	Indikator ROE	2007	2008	2009	2010	2011
1	Martapura			12,98%	15,19%	16,90%	15,76%	15,42%
2	Sungai Tabuk			9,60%	20,65%	19,58%	13,60%	16,10%
3	Simpang Empat			38,03%	26,19%	32,40%	32,38%	22,47%
4	Astambul			14,97%	17,08%	15,12%	13,20%	16,54%

ROE = Net Income/Equity Capital X 100 %

Sebagai Rentabilitas Modal Sendiri, yang menunjukkan ukuran kemampuan manajemen bank menjalankan operasional bank secara efektif dan efisien dalam menggunakan sumber – sumber (modal sendiri) untuk mengembangkan upaya penghasilan yang optimal.

j. **BOPO (< 93.5 %)**

No	Entitas PD BPR	Aspek Beban	Indikator BOPO	2007	2008	2009	2010	2011
1	Martapura			81,37%	82,22%	81,69%	76,10%	76,45%
2	Sungai Tabuk			90,02%	77,00%	76,68%	74,19%	75,94%
3	Simpang Empat			67,98%	61,78%	58,16%	55,08%	56,17%
4	Astambul			76,35%	71,28%	73,05%	71,88%	69,39%

Konsep beban dijelaskan dengan konsep beban tetap dan variabel, atau dengan kondisi dapat dikendalikan atau tidak mudahnya dikendalikan suatu beban organisasi. Beban yang kurang dari criteria rasio di atas, menujukkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan.

k. *LIQUIDITY*

Likuiditas: Cash ratio > 4 %

No	Entitas PD BPR	Aspek Likuiditas	Indikator Cash Ratio	2007	2008	2009	2010	2011
1	Martapura			4%	3%	3%	3%	3%
2	Sungai Tabuk			10%	8%	8%	7%	2%
3	Simpang Empat			5%	6%	3%	7%	2%
4	Astambul			4%	2%	4%	5%	1%

Kondisi likuid yang bersifat cash, dinyatakan di atas 4 % dari nilai asset. Ukuran likuiditas menentukan kelancaran layanan pada entitas perbankan.

l. Likuiditas

LDR (80- 95 %)

No	Entitas PD BPR	Aspek Likuiditas	Indikator LDR	2007	2008	2009	2010	2011
1	Martapura			82,17%	88,23%	83,00%	82,86%	87,88%
2	Sungai Tabuk			154,83%	71,67%	61,90%	65,38%	72,68%
3	Simpang Empat			83,60%	83,20%	80,86%	75,03%	84,64%
4	Astambul			63,00%	75,00%	83,13%	71,26%	73,94%

LDR = Total Loans/ Total Deposit X 100 %, dan LDR = Total Loans (Kredit/ Total Deposit (DPK) X 100 %.

Ukuran kesehatan keuangan perbankan secara keseluruhan sebagai kemampuan menghimpun dana tabungan dari masyarakat (DPK) dan kemudian menyalurkan menyalurkan dana tersebut ke masyarakat berbentuk kredit. Untuk DPK /penghimpunan dana /loan: BPR cenderung menghadapi kesulitan karena adanya pesaing dari bank umum yang notaben sudah lebih terpercaya di masyarakat luas (karena , seperti aspek capital), dan kurang begitu baik tingkat kepercayaan kepada BPR menjadi salah satu kendala perbankan (BPR). Rasio LDR memberitahukan

tentang kemampuan menghasilkan laba pada tabungan yang setelah dijadilan produk kredit baru. Dapat digunakan dalam membandingkan perusahaan keuangan (bank) dalammenilai kesehatannya. Penghimpunan dana yang tinggi seringkali dianggap merepleksikan penerimaan bank atas kesempatan pengucuran kredit yang efektif.

4.3.4.Aspek Teknologi

Sesua SE BI Nomor 15/20/DKBU Tertanggal 22 Mei 2013 Perihal Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat terkait aspek teknis dikemukakan: PERSYARATAN PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN BULANAN BPR

Persyaratan yang perlu dipenuhi dalam rangka penyusunan dan penyampaian Laporan Bulanan adalah:

A. Komputer yang memenuhi konfigurasi perangkat keras dan perangkat lunak sesuai Petunjuk Teknis Aplikasi Laporan Berkala BPR sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
B. Pegawai BPR yang ditunjuk sebagai petugas yang memiliki kompetensi untuk menyusun dan melakukan verifikasi Laporan Bulanan dan/atau koreksi Laporan Bulanan.
C. Pejabat atau Pegawai BPR yang ditunjuk sebagai penanggung jawab untuk melakukan verifikasi ulang dan menyampaikan Laporan Bulanan dan/atau koreksi Laporan Bulanan kepada Bank Indonesia.
D. Pedoman tertulis mengenai sistem dan prosedur penyusunan dan penyampaian Laporan Bulanan dan/atau koreksi Laporan Bulanan.
E. Sistem pengamanan yang memadai terhadap komputer, aplikasi yang digunakan, dan data Laporan Bulanan.
F. *Back up* data Laporan Bulanan yang ditatausahakan dengan baik.

Lingkungan Teknologi:

Tantangan di industry perbankan adalah pada system pembayaran berbasis elektronik. Kebutuhan entitas bank untuk memenuhi Computer based Information Systems, dengan AISs, IRSs, DSSs/SDSs, dan Office Automation. Analisis eksternal

(tantangan dan peluang) menentukan pilihan strategi untuk memenuhi kinerja capaian *public acceptance.*

Evaluasi OT

Berdasarkan data di atas, menunjukkan adanya capaian kinerja BPR yang berbeda, dengan karakteristik capaian indicator PEST. Yang membedakan capaian kinerja tersebut adalah strategi, karena kinerja= f (strategi). Untuk menjaga pengharapan kinerja kelembagaan dari BPR, maka penetapan strategi dikemukakan melalui implementasi SAK ETAP dengan penguatan PA BPR sesuai petunjuk pelaksanaannya yangdilembagakan.

Model pengembangan diperlukan sesuai BI (2011), yang mengemukakan model bisnis BPR terkait keputusan pemilik sebagai pemangku kepentingan meliputi pertimbangan: adanya pengelolaan BPR secara sehat, komitmen pengembangan wilayah setempat, pemahaman potensi usaha dan karakteristik masyarakat, komitmen dan kemampuan mendukung permodalan BPR. Deskripsi di atas, sesuai fakta empiris pada sektor perbankan yaitu: *adanya factor-faktor yang mempengaruhi pencapaian rentabilitas bank, berupa : idle fund, efisiensi usaha, resiko usaha. Kemudian adanya hubungan positif antara pertumbuhan CAR dengan ROE; CAR dengan ROA; Aspek likuiditas dalam indicator keuangan LDR berpengaruh terhadap ROA; kemudian tingkat kredit yang diberikan berpengaruh terhadap profitabilitas bank.*

Berdasarkan bahasan analisis fungsi dan peran aspek regulasi akuntansi menjadi aspek fundamental dalam memenuhi arah pencapaian Tujuan, Sasaran, dan penentuan strategi dan Kebijakan. Kebijakan tersebut meliputi aspek organisasi, perencanaan dan pengendalian, produk/layanan, keuangan, kepegawaian, umum,

pengawasan) yang diperkuat dengan kebijakan akuntansi entitas BPR. Hal berikutnya terkait dengan Program dan kegiatan sesuai strategi dan kebijakan manajemen BPR, dan untuk dasar menetapkan anggaran investasi sesuai asumsi dan Proyeksi Keuangan BPR.

Penerapan sistem akuntansi entitas BPR dalam praktek kekinian dan kebutuhan penyesuaian penyajian akun elemen laporan keuangan dikemukakan berikut:

DESKRIPSI dan INTERPRETASI

SAK IFRS VS SAK ETAP

Uraian	**SAK Umum (IFRS)**	**SAK ETAP**
Dasar	Fair Value – Professional judgment	Orientasi basis Historical Cost
Implikasi prinsip konservatisme	Tidak digunakan	Digunakan
Presentation	PSAK No 1 berorientasi IFRS dengan: L/R komprehensif Neraca (tidak menyajikan akun luar biasa) LAK: Lebih pada metode langsung	Implikasi Sesuai Kerangka konseptual: L/R (tidak diharuskan komprehensif) Neraca (jumlah definitive akun lebih sedikit; silent terhadap akun luar biasa) LAK/Cash Flow: metode tidak langsung.
Aset Tetap dan Investasi	Alternatif metode biaya atau revaluasi asset tetap	Metode biaya (at cost/harga perolehan), kecuali ada regulasi lain dari regulator
ATB	Diamortisir untuk 20 tahun ATB dengan umur ekonomis tak terbatas tidak diamortisir	Diamortisir untuk 10 tahun -pengukuran dengan at cost
Persediaan	LIFO tidak lagi diijinkan	LIFO tidak diijinkan
Penurunan Nilai aset	Pengakuian penurunan: ruang lingkup kecuali : Persediaan, asset yang timbul dari kontrak konstruksi, asset pajak tangguhan, asset yang timbul dari pension plan Penurunan nilai non persediaan Penurunan nilai unit penghasil kas dan *goodwill*	Pengakuan penurunan: Ruang lingkup : Meliputi semua jenis asset kecuali asset dari manfaat pension (pension plan) Tidak mengatur pengakuan penutunan nilai *goodwill* Ada tambahan penurunan nilai untuk pinjaman yang diberikan dan piutang (yang menggunakan PSAK 31)

Uraian	SAK Umum (IFRS)	SAK ETAP
Sewa	Mengatur perjanjian (transaksi sewa) -Perlakuan : principle based. Penyajian laporan keuangan untuk Lessee dan Lessor	Tidak mengatur perjanjian (transaksi sewa): Ref: PSAK No 8.sewa (kombinasi IFRS for SMEs dan SFAS (rule based) Penyajian laporan keuangan Lessee dan Lessor menggunakan PSAK No 30 (Akuntansi sewa)
Biaya Pinjaman	Komponen pos /akun biaya pinjaman , diakui dan dikapitalisasi	Pembebanan langsung
Instrumen Keuangan	Ruang lingkup: asset dan kewajiban keuangan -Diklasifikasi pada fair value atau nilai wajar melalui laporan LR, yang dimiliki hingga jatuh tempo, tersedia untuk dijual, pinjaman dan pinjaman yang diberikan Impayment dengan konsep incurred loss Pengakuan kembali (derecognition) Hedging dan derivative	Ruang lingkup : investasi pada surat berharga (efek) tertentu. Klasifikasi trading, held to maturity, available foer sale (Ref PSAK No 50/1998) -Simply disbanding (PSAK No 50 dan PSAK No 55 (revisi 2006)
Imbalan kerja	Deskripsi: Imbalan kerja jangka pendek Imbalan pasca kerja, untuk manfaat pasti digunakan Project Unit Credit (PUC) Imbalan kerja jangka panjang lainnya Pesangon pemutusan kerja Imbalan berbasis ekuitas	Tidak meliputi imbalan berbasis ekuitas -untuk manfaat pasti menggunakan PUC dan jika tidak diguankan metode yang disederhanakan
Laporan keuangan konsolidasian	Sesuai PSAK No 4 (menggunakan metode ekuitas (hubungan kepemilikan: entitas aosiasi, joint venture,) metode konsolidasian penuh untuk entitas anak (subsidiary)	Tidak diatur (jika ada investasi atas asosiasi maupun subsidiary digunakan metode ekuitas (on line consolidation)
Pajak Penghasilan	Menggunakan deffered tax concept Pengakuan dan pengukuran current tax Pengakuan dan pengukuran deffered tax	Gunakan konsep tax payable concept Tidak ada pengakuan dan pengukuran pajak tangguhan

UNSUR LAPORAN KEUANGAN : NERACA BPR (PA -BPR)

PSAK (PAPI 2001)	PA-BPR (Ref: SAK ETAP)
ASET: Kas Aktiva dalam Valas SBI Pendatan Bunga YAD Antar Bank Aktiva Kredit yang Diberikan Penyisihan PAP Total Agunan yang diambil alih Aset Tetap dan Inventaris AK Penyusutan Total Rupa-Rupa Aktiva	ASET: Kas Kas dalam valas SBI Pendapatan Bunga YAD Penempatan pada Bank Lain Kredit yang diberikan Penyisihan kerugian Total Agunan yang diambil alih Aset Tetap dan Inventaris AK Penyusutan Total Aset Tidak Berwujud Aset Lain-Lain
KEWAJIBAN: Kewajiban-Kewajiban yang segera dapat dibayar BI Tabungan, Deposito Berjangka Antar bank Pasiva Pinjaman yang diterima Pinjaman subordinasi Rupa-Rupa Pasiva	KEWAJIBAN: Kewajiban Segera Pinjaman dari BI Utang Bunga Utang Pajak Simpanan Simpanan dari Bank Lain Pinjaman Diterima Dana Setoran Modal-Kewajiban Kewajiban Imbalan Kerja Pinjaman Subordinasi Modal Pijaman Kewajiban Lain-lain
MODAL: Modal Dasar, Modal yang belum disetor Agio, Disagio, DSM Modal Sumbangan Total Dana Setoran Modal Selisih Penilaian kembali AT Cadangan Cadangan Tujuan Cadangan Umum Laba yang Ditahan L/R : Tahun lalu/tahun berjalan	EKUITAS: Modal Modal Disetor Tambahan Modal Disetor Modal Sumbangan Total Dana Setoran Modal-Ekuitas L/R yang belum direalisasi Surplus Revaluasi AT Saldo Laba Cadangan Tujuan Cadangan Umum Belum Ditentukan Tujuan

UNSUR LAPORAN KEUANGAN : LABA RUGI BPR (PA -BPR)

PSAK (PAPI 2001)	PA-BPR (Ref: SAK ETAP)
Pendapatan Operasional Bunga (bank, pihak ketiga, lainnya) Provisi dan Komisi Lainnya	Pendapatan Operasional Pendapatan Bunga Bunga Kontraktual Provisi Biaya Transaksi Total
Beban Operasional Bunga (BI, Bank, Pihak Ketiga, lainnya) Penyusutan/Penghapusan Premi Biaya Tenaga Kerja, sewa, pajak, pemeliharaan dan perbaikan Barang dan Jasa Lainnya	Beban Bunga Pendapatan Bunga Neto Pendapatan Operasional Lainnya Jumlah Pendapatan Operasional Beban Penyisihan Kerugian/Penyusutan Beban Penyisihan Kerugian Simpanan Beban Pemasaran Beban Admnistrasi dan Umum Jumlah Beban Operasional
Laba/Rugi Sebelum Pajak Pajak Laba/Rugi Setelah pajak	Laba/Rugi Operasional Pendapatan dan Beban Non-Operasional: Pendapatan non operasional Beban non –operasional Jumlah Pendapatan (Beban) Non –Operasional L/R sebelum pajak penghasilan Taksiran Pajak penghasilan Laba/rugi Neto

UNSUR LAPORAN KEUANGAN :LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (PA -BPR)

Uraian	Modal			DSM -E	L/R unrealised	Surplus Revaluasi AT	Saldo laba			Jumlah
	MD	MT	MS				CT	CU	BD	
Saldo Per 31Des 2xx0										
Dividen										
Pembentukan										
Cadangan										
DSM-Ekuitas										
L/R Yang Belum Direalisir										
Revaluasi AT										
Laba/Rugi Periode Berjalan										
Saldo per 31 Des 2xx1										
Dividen										
Pembentukan cadangan										
DSM-Ekuitas										
L/R yang belum direalisir										
Revaluasi AT										
L/R Periode Berjalan										
Saldo Per 31 Des 2xx2										

UNSUR LAPORAN KEUANGAN :LAPORAN ARUS KAS (PA -BPR)

Uraian	31 Des 2xx1	31 Des 2xx0
Arus Kas dari Aktifitas Operasi:		
Laba Neto:	xxxxx	xxxxxx
Penyesuaian rekonsiliasi laba neto menjadi kas Bersih dari kegiatan operasi:		
Penyusutan asset tetap	xxxxx	xxxxxx
Penyisihan kerugian (pembalikan atas penyisihan) atas penempatan pada bank lain (non Giro)	xxxxx	xxxxxx
Kredit		
Amortisasi:	xxxxx	xxxxx
Provisi/biaya transaksi	xxxxx	xxxxx
ATB	xxxxx	xxxxx
Pendapatan bunga yang ditangguhkan (dampak restrukturisasi)	xxxxx	xxxxx
Penurunan nilai agunan yang daimbil alih	xxxxx	xxxxx
Laba penjualan asset tetap	xxxxx	xxxxx
Selsih kurs valuta asing	xxxxx	xxxxx
Perubahan asset dan kewajiban operasi:		
Penempatan pada bank lain	xxxxxx	xxxxxx
Pendapatan bunga yad	xxxxxx	xxxxxx
Kredit yang diberikan	xxxxxx	xxxxxx
Agunan yang diambil alih	xxxxxx	xxxxxx
Aset lain-lain	xxxxx	xxxxx
Kewajiban segera	xxxxx	xxxxx
Utang bunga	xxxxx	xxxxx
Utang pajak	xxxxx	xxxxx
	xxxxx	xxxxx
Simpanan:		
Tabungan	xxxxx	xxxxx
Deposito Berjangka	xxxxx	xxxxx
Simpanan dari bank lain	xxxxx	xxxxx
Pinjaman yang diterima	xxxxx	xxxxx
Kewajiban imbalan kerja	xxxxx	xxxxx
Kewajiban lain-lain	xxxxx	xxxxx
Arus Kas Neto dari Aktifitas Operasi	xxxxx	xxxxx
Arus kas dari Aktifitas Investasi	xxxxx	xxxxx
Pembelian/penjualan AT dan Inventaris	xxxxx	xxxxx
Pembelian/penjualan ATB	xxxxx	xxxxx
Pembelian/penjualan SBI	xxxxx	xxxxx
Arus Kas dari Aktifitas Investasi	xxxxx	xxxxx
Arus kas dari Aktifitas Pembiayaan/Pendanaan	xxxxx	xxxxx
Penerimaan /pembayaran pinjaman subordinasi	xxxxx	xxxxx
Penerimaan/pembayaran modal pinjaman	xxxx	xxxx
Pembayaran Dividen	xxxxx	xxxxx
Arus Kas Neto dari Aktifitas Pendanaan	xxxxx	xxxxx
Kenaikan (penurunan) Arus Kas	xxxxx	xxxxx
Kas dan Setara Kas Awal Periode'	xxxxx	xxxxx
Kas dan Setara Kas Akhir Periode	xxxxx	xxxxx

PENYESUAIAN DETAIL AKUN LAPORAN KEUANGAN BPR (PA BPR)

No	Uraian	Perlakuan Akuntansi	Keterangan
1	Kredit yang diberikan (Saldo pokok kredit yang masih ada),	Kredit yang diberikan-Pokok xxx Kredit yang diberikan xxx	Perubahan nama akun
2	Saldo provisi belum diamortisir (diakui sebagai rupa-rupa pasiva)	Rupa-Rupa Pasiva-Provisi xxxx Kredit yang diberikan-Provisi xxxx	Reklasifikasi dampak pengakuan kredit
3	Amortisasi provisi (pengakuan pendapatan provisi reklasifikasi menjadi pendapatan bunga	Pendapatan Operasional-Provisi dan Komisi xxxxx Pendapatan bunga Provisi xxxxxx	Koreksi reklasifikasi atas pengakuan provisi dari penyerahan kredit
4	Amortisasi provisi (seluruh provisi langsung diakui sebagai pendapatan operasional –provisi terkait pemberian kredit	Pendapatan operasional -provisi dan komisi xxxx Kredit yang diberikan-provisi xxxxx	Koreksi pendapatan bunga (sebesar proporsi sesuai jangka waktu kredit)
5	Biaya transaksi kredit (saldo biaya transaksi kredit BPR dan belum diamortisir)	Pendapatan bunga -provisi Kredit yang diberikan-Biaya transaksi xxxxxx Akun terkait xxxxxxx	Reklasifikasi
6	Amortisasi biaya transaksi dan diakui sebagai beban operasional	Pendapatan Bunga-Biaya transaksi xxxxx Beban Operasional xxxxx	Reklasifikasi: Sebesar jumlah proporsional sesuai jgk waktu kredit
7	Seluruh biaya transaksi langsung diakui sebagai beban	Kredit yang diberikan-Biaya transaksi xxxxxx Pendapatan bunga-Biaya transaksi xxxxxxx Beban Operasional terkait xxxxxxx	Koreksi
8	Agunan yang diambil alih tidak memenuhi definisi agunan yang diambil alih	Kredit yang diberikan-Rupa-rupa aktiva xxxxxxx Agunan yang diambil alih xxxxxx	Reklasifikasi
9	Agunan dicatat dalam rekening administrative (pembentukan penyisihan kerugian kredit yang diberikan)	Saldo Laba xxxxx Penyisihan Kerugain Kredit xxxxxxx	Reklasifikasi
10	Pengambil alihan agunan yang terjadi yang tidak memenuhi definisi agunan	Kredit yang diberikan-Rupa-_rupa aktiva xxxxx Agunan yang diambil alih xxxxxx	Reklasifikasi

No	Uraian	Perlakuan Akuntansi	Keterangan
	Dimunculkan kembali sebagai beban	Beban operasional xxxxx Penyisihan Kerugian Kredit xxxxx	Koreksi
	Pengakuan penurunan nilai AYDA	Saldo Laba xxxxxx Akumulasi rugi penurunan nilai xxxxx	
11	AYDA memiliki surplus penilaian	Surplus revaluasi asset tetap xxxxx Saldo Laba xxxxxx	Koreksi pengakuan
12	Kewajiban imbalan kerja	Rupa-Rupa Pasiva- Imbalan Kerja xxxxxxx Kewajiban Imbalan Kerja xxxxxx	Reklasifikasi surplus revaluasi AT (ekuitas) ke Saldo Laba
13	Pendapatan bunga yad	Pendapatan bunga yad xxxxx Rupa-rupa aktiva- Pendapatan bunga yad xxxxxx	Koreksi pengakuan
14	Utang Bunga	Kewajiban Segera- Rupa-rupa pasiva xxxx Utang Bunga xxxxx	Pengakuan dengan reklasifikasi
15	Pengakuan beban bunga deakunito	Beban Operasonal-Bunga xxxxxx Deakunito-Biaya Transaksi xxxxx Beban Operasional Terkait xxxxxx	Reklasifikasi saldo utang bunga
16	Tabungan Jatuh Tempo	Tabungan/Deakunito/AB Pasiva xxxx Tabungan/Deakunito- Kewajiban simpanan JT xxxxx	Pengakuan Reklasifikasi
17	Pinjaman yang diterima (saldo biaya transaksi dan provisi yang belum diamortisasi)	Akun (rupa-Rupa Aktiva) xxxx Pinjaman yang diterima- Biaya transaksi xxxxx Pinjaman yang diterima- Provisi xxxxxx	Koreksi pengakuan biaya/bagian dari biaya perolehan (HC)
18	Bunga Kredit *non performing*	Pendapatan bunga xxxxx Kredit yang diberikan-Pokok xxxxx	Koreksi dan reklasifikasi (pendapatan bunga dengan peliunasan pokok kredit)

PENYAJIAN UNTUK AKUN BPR

Akun	PSAK (PAPI 2001)	PA-BPR (SAK ETAP)
Kas Rupiah	Termasuk mata uang rupiah yang ditarik dari peredaran dan yang masih dalam masa tenggang dalam penukaran	Tidak berlaku untuk mata uang rupiah yang ditarik dari peredaran (klasifikasi ke asset lain-lain) Perlu pengungkapan jumlah kas termasuk dalam mesin ATM
Sertifikat Bank Indonesia	Klasifikasi SBI: Dimiliki hingga jatuh tempo Trading Tersedia untuk dijual	Klasifikasi SBI: Dimiliki hingga jatuh tempo Tersedia untuk dijual Tidak untuk diperdagangkan (trading) Pengungkapan SBI lengkap
Pendapatan bunga yad	Dicatat dalam aktiva lain-lain	Dicatat dalam akun tersendiri untuk kualitas performing (termasuk ABA)
Kredit yang diberikan	Kredit awal sama dengan pokok kredit. Sesuai asas materialitas dan manfaat, dan akun provisi dan biay transaksi dapat diamortisir garis lurus	Kewajiban komitmen fasilitas kredit; dengan kredit awal sama dengan pokok kredit (plafond). Commitment fee diakui dan diamortisir. (mengacu base HC)
Penyajian untuk Pelunasan kredit tidak lancar	Setoran debitur untuk status Lancar, DPK dan KL, penyajian dengan urutan: biaya, bunga, pokok	Kredit performning untuk pelunasan bunga; untuk kredit non performing digunakan sebagai pelunasan tunggakan pokok yang telah jatuh tempo, sisanya (jika ada) untuk pelunasan tungggakan bunga.
ATB	Klasifikasi aktiva lain-lain	Disajikan dalampos tersendiri
Biaya Pendirian	PSAK No 19: Aktiva tidak berwujud (2000) tidak termasuk beban yang ditangguhkan 9aset lain-lain)	PSAK 16 (2007) PSAK 19 (2009) Biaya pendirian (biaya perintisan) termasuk yang diakui sebagai beban saat kejadiannya
Agunan YDA	Tidak diatur (sebagai bagian aktiva rupa-rupa)	-Agunan YDA timbul dari pengambil alihan agunan untuk penyelesaian kredit dan kredit dihapus tagih. Pengambil alihan agunan dalam proses penyelesaian kredit dengan tidak disertai penghapusan tagihan kredit (dicatat secara off balance sheet) -Dinilai periodek (tahunan) Selisih penilaian Agunan YDA (data pasar) terhadap nilai tercatat, diakui sebagai kerugian karena turunnya nilai agunan.

Akun	PSAK (PAPI 2001)	PA-BPR (SAK ETAP)
Kewajiban Segera	Sifatnya wajib segera dibayar	Klausal (termasuk kewajiban yang telah jatuh tempo, selain utang bunga)
Utang Bunga	Dicatat dalam pos kewajiban lain-lain	Dicatat dalam akaun tersendiri (akun utang bunga)
Simpanan	Beban diakui sesuai perhitungan tingkat bunga (konraktual)	Beban bunga yang diakui termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan langsung Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung adalah biaya dari simpanan jangka waktu tertentu.(Konsepsi HC)
Beban bunga	Beban periode pelaporan	Beban bunga meliputi beban amortisasi biaya pinjaman (koreksi dengan utang biaya bunga (HC)
Pinjaman yang diterima	Pengakuan beban dalam periode berjalan Biaya transaksi sebagai beban periode berjalan	Pinjaman diakui dengan nilai pokok ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan Biaya transaksi diamortisir dengan metode garis lurus (HC)
Kewajiban imbalan kerja	Tidak diatur	Disajikan dengan pos sendiri
Utang pajak	Hanya mengatur deffered tax liabilities; tax payable karena koreksi time different	Mengatrur PPh badan terutang setelah dihitung dengan PPh dibayar dimuka Disajikan dengan pos utang pajak
Modal	Dana setoran Modal: tidak diatur	DSM: diatur sesuai karakteristiknya; Modal dasar; Modal disetor; Agio Saham; Modal sumbangan

BAB 5

PENUTUP

Bab ini merupakan simpulan dan saran yang dikemukakan berdasarkan hasil pembahasan, studi teoritis serta studi empirik, yang dideskripsikan dengan analisis kualitatif.

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dikemukakan simpulan sebagai berikut:

1. Meskipun sempat memiliki kekosongan acuan petunjuk teknis pelaksanaan untuk dasar 1. pelaksanaan konversi pelaporan keuangan entitas BPR sesuai SAK ETAP dan PA BPR sejak tahun 2010, namun sejak Agustus 2013, sistem tersebut sudah harus diterapkan sesuai ketentuan pelaksanaan PA BPR secara melembaga sesuai kerangka konseptual dan SAK ETAP.
2. Implementasi SAK ETAP BPR dengan pelaksanaan PA BPR didasarkan acuan petunjuk teknis pelaksanaan, yaitu SE untuk Implementasi SAK ETAP untuk laporan bulanan BPR (SE BI Nomor 15/20/DKBU/Tanggal 22 Mei/2013 (Laporan Bulanan BPR), SE Nomor 15/39/DPNP/Tanggal 17 September/2013 (Perubahan atas SE BI Nomor 15/20/DKBU/Tanggal 22 Mei 2013 (Laporan Bulanan BPR).

5.2. Saran-Saran

Berdasarkan hasil temuan empirik dan simpulan dari penelitian ini, dikemukakan saran-saran untuk pengembangan implementasi SAK ETAP BPR di Kalimantan Selatan, sebagai berikut:

1. Dalam upaya mencapai kinerja sistem informasi keuangan entitas BPR diperlukan penguatan sistem regulasi akuntansi dan pelaporan keuangan BPR sesuai dengan acuan otoritas akuntansi dan otoritas perbankan di Indonesia.
2. Sistem acuan SAK ETAP dan acuan PA BPR dengan SE dari BI sebagai petunjuk teknis pelaksanaan konversi diperlukan pelembagaannya dengan dukungan aspek re-regulatori pada tingkat entitas BPR, substansi pelaporan yang fokus pada nilai ekonomis organisasi, komunikasi sosial yang melembaga, serta dukungan teknologi informasi yang representatif.
3. Pentingnya kejelasan tujuan dan proses strategi dan manajemen, serta operasional dari Peran BI, PERBAMIDA, PERBAMIDO, BPD, dalam penerapan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan entitas BPR.

DAFTAR PUSTAKA

Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat.

Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia nomor 12/14/DKBU 2010 tentang Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat

Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia nomor 15/20/DKBU tanggal 22 Mei 2013 perihal Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat.

Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia nomor 15/39/DPNP 17 September 2013 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia nomor 15/20/DKBU tanggal 22 Mei 2013 perihal Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat.

Belkoui, 2006. **Teori Akuntansi**, edisi kelima, Salemba Empat. Jakarta.

Bungin, B. 2001. **Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer**.Rajagrafindo Persada. Jakarta

Bungin, B. 2005. **Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model aplikasi**.Rajagrafindo Persada. Jakarta

Harahap, Sofyan Syafri. 2011. **Teori Akuntansi Edisi Revisi 2011**RajawaliPers: Jakarta

Herdiansyah, H. 2010. **Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial.** Jakarta:Salemba Humanika.

Herli, Ali Suyanto, 2013. **Pengelolaan BPR dan Lembaga Keuangan Pembiayaan Mikro,** Penerbit Andi, Jakarta.

Horngren, Charles T, dan Walter T. Harrison, 2007. **Accounting.** Edisi 7. Pearson Education

Ikatan Akuntan Indonesia, 2009. **Standar Akuntansi Keuangan, Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.** Jakarta.

Ikatan Akuntan Indonesia, 2009. **Standar Akuntansi Keuangan per Juli 2009**, Jakarta; Salemba Empat.

Kieso, Donald E., Jerry J. Weygandt, dan Terry D. Warfield. 2010. **Intermediate Accounting. IFRS Edition.** Edisi1. John wiley & sons.

Stice, James D., Earl K. Stice, dan K. Fred Skousen. 2010. **Intermediate Accounting**. Edisi 17. South-western/Cengage Learning.

Fakultas Ekonomi Unlam, Bahan –Bahan Workshop, 2012, SAK EATP, Banjarmasin

www.iaiglobal.or.id